**BAB II**

**KAJIAN TEORITIK**

1. **Acuan Teoritik**
2. **Definisi Akuntabilitas**

Secara etimologi atau harfiah kata akuntabilitas berasal dari bahasa Inggris; *kk.* *to account* artinya laporan atau pertanggungjawaban, *to call to account* artinya dimintai pertanggungjawaban.[[1]](#footnote-1) dan *kb;* yaitu *accountability* yang berarti keadaan untuk dapat dipertanggungjawabkan atau keadaan dapat dimintai pertanggungjawaban” atau dalam bentuk *ks;*  yaitu *accountable* yang artinya bertanggungjawab.[[2]](#footnote-2) Dalam bahasa Arab disebut dengan kata المسئول-المسئولية-التبعة dari shighat fi’ilnya سأل-يسأل-سؤالا artinya yang ditanya atau diminta pertanggungjawaban.[[3]](#footnote-3) Bedanya dengan *responsibility* yang juga diartikan sebagai “tanggungjawab”. Pengertian *accountability* dan *responsibility* seringkali diartikan sama, padahal maknanya sangat berbeda. Beberapa ahli menjelaskan bahwa dalam kaitannya dengan birokrasi, *responsibility* merupakan otoritas yang diberikan atasan untuk melaksanakan suatu kebijakan. Sedangkan *accountability* merupakan kewajiban untuk menjelaskan bagaimana realisasi otoritas yang diperolehnya tersebut.

Sedangkan secara terminologi atau istilah seperti yang didefinisikan Bovens, bahwa akuntabilitas adalah pengaturan institusi sebagai hubungan sosial di mana seorang aktor merasa berkewajiban untuk menjelaskan dan memberikan pembenaran terhadap tindakannya kepada pihak lain.[[4]](#footnote-4) Selanjutnya dinyatakan juga akuntabilitas sebagai pengaturan institusi empat elemen: adanya akses publik terhadap laporan yang diberikan, penjelasan dan pembenaran terhadap tindakan yang dilakukan, penjelasan harus dilakukan dalam sebuah forum yang spesifik, aktor harus memiliki kewajiban untuk hadir.[[5]](#footnote-5)

Mc. Ashan menyatakann bahwa akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performannya dalam menyelesaikan tujuan yang menjadi tanggungjawabnya.[[6]](#footnote-6) Adapun makna yang paling luas dari akuntabilitas menurut Nanang Fattah yaitu:

1). Cocok atau sesuai *(fitting in)* dengan peranan yang diharapkan.

2). Menjelaskan dan mempertimbangkan kepada orang lain tentang

keputusan dan tindakan yang diambilnya. 3). Performa yang cocok dan meminta pertimbangan atau penjelasan kepada orang lain.[[7]](#footnote-7)

Akuntabilitas adalah suatu peningkatan rasa tanggungjawab karena menuntut adanya kepuasan dari pihak lain. Akuntabilitas membutuhkan *aturan, ukuran* atau *kriteria*, sebagai indikator keberhasilan suatu pekerjaan atau perencanaan. Dengan demikian, maka akuntabilitas adalah suatu keadaan performan para petugas yang mampu bekerja dan dapat memberikan hasil kerja sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan bersama sehingga memberikan rasa puas pihak lain yang berkepentingan.

Berkaitan dengan istilah akuntabilitas, Sirajudin dan Aslam berpendapat bahwa akuntabilitas merupakan sisi-sisi sikap dan watak kehidupan manusia yang meliputi akuntabilitas *internal* dan *eksternal* seseorang. Dari sisi internal seseorang akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban orang tersebut kepada Tuhannya. Sedangkan akuntabilitas eksternal seseorang adalah akuntabilitas orang tersebut kepada lingkungannya baik lingkungan formal (atasan-bawahan) maupun lingkungan masyarakat.[[8]](#footnote-8)

Definisi di atas menunjukkan bahwa akuntabilitas berkaitan dengan pelaksanaan evaluasi (penilaian) mengenai standar pelaksanaan kegiatan, apakah standar yang dibuat sudah tepat dengan situasi dan kondisi yang dihadapi, dan apabila dirasa sudah tepat, manajemen memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan standar-standar tersebut.

Deklarasi Tokyo (1985) dalam Lembaga Administrasi Negara mengenai petunjuk akuntabilitas publik menetapkan pengertian akuntabilitas yakni kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban fiskal, manajerial dan program.[[9]](#footnote-9)

LawtondanRose mendefinisikan akuntabilitas sebagai sebuah proses di mana seseorang atau sekelompok orang yang diperlukan untuk membuat laporan aktivitas mereka dan dengan cara yang mereka sudah atau belum diketahui untuk melaksanakan pekerjaan mereka.   Akuntabilitas sebagai salah satu prinsip *good corporate governance* berkaitan dengan pertanggungjawaban pimpinan atas keputusan dan hasil yang dicapai, sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi. Prinsip akuntabilitas digunakan untuk menciptakan sistem kontrol yang efektif berdasarkan distribusi kekuasaan.

Akuntabilitas juga merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil serta cara-cara yang digunakan untuk mencapai semua itu. Pengendalian (*control*) sebagai bagian penting dalam manajemen yang baik adalah hal yang saling menunjang dengan akuntabilitas. Dengan kata lain pengendalian tidak dapat berjalan efisien dan efektif bila tidak ditunjang dengan mekanisme akuntabilitas yang baik demikian juga sebaliknya.

Definisi di atas menunjukkan beberapa aspek bahwa di dalam akuntabilitas terkandung rasa puas dari pihak lain, model kontrol, bentuk dialog, kriteria dan ukuran. Rasa puas pihak lain terjadi apabila menurut kenyataan mampu memenuhi kontrak sebagai hasil dialog sebelumnya, yaitu tepat dengan kriteria yang sudah ditentukan yang tercermin oleh kontrol yang dilakukan oleh pihak lain. Dengan demikian, maka akuntabilitas adalah suatu keadaan performan para petugas yang mampu bekerja dan memberikan hasil karya yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan bersama sehingga memberikan rasa puas pihak lain yang berkepentingan.

1. **Definisi Akuntabilitas Perspektif Islam**

Dalam kamus *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A’lam*, kata pertanggungjawaban berasal dari kata tanggungjawab yang disebut dengan istilah مسؤولة - مسؤولية yang berasal dari kata fiil- مسئولة سأل- يسأل- سؤالا artinya bertanya dan مسئولة adalah bentuk *mashdar mimi* dan

ما يكون به الإنسان مسؤولا ومطالبا عن أمور أو أفعال أتاها : مسؤولية -ditambah *ya’ nisbah-* maksudnya suatu pertanggungjawaban pada manusia yang di minta atau dituntut dari urusan-urusan atau sesuatu perkara atau pekerjaan-pekerjaan yang diberikan atau dipercayakan kepadanya.[[10]](#footnote-10) juga kata رعية yang berasal dari kata رعية رعا- يرعا – رعيا - yang berarti memimpin, menjaga, memelihara dengan penuh rasa tanggungjawab.[[11]](#footnote-11) Dalam *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A’lam*  ditulis : رعى-يرعى-رعاية: الأمير رعيته أي ساسها وتدبر شؤونها [[12]](#footnote-12) yang berarti memelihara dan mengatur urusannya dengan penuh amanah حفظ –يحفظ – حفظا :منعه عن الضياع و التلف. dan - محافظًة على الأمر حافظ-يحافظ-حفاظا = واظب عليه وراقبه وراعاه , تحفّظ =احترز وتصوّن ,احتفظ = اختصّ به, artinya memeliharanya dengan penuh tanggungjawab dari hilang dan rusak, menjaga, mengawasi, memantau dengan teliti dan hati-hati, menjaga dan memelihara secara fokus dan penuh tanggungjawab.[[13]](#footnote-13)

Dalam al-Qur’an kata isim مسئولا disebut 4 kali yaitu:

Surat al-Isra’ (17): 34,

وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً

*Artinya:”Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabannya” (Q.S. al-Isra’ [17]: 34).[[14]](#footnote-14)*

Dan pada surat al-Isra’ (17): 36,

وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً

*Artinya:”Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabannya. (Q.S. al-Isra’ [17]: 36).[[15]](#footnote-15)*

Pada dua ayat di atas kata مَسْئُولاً memiliki arti pertanggungan jawaban yang diminta terkait dengan tugas dalam mengurus harta anak yatim dan pertanggungjawabannya itu meliputi pendengaran, penglihatan dan mata hati seseorang. Dan terminologi pada dua ayat di atas diperkuat dengan kandungan ayat ke 35 yang terkait dengan ukuran, takaran dan hitungan *(account)* وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ .

Surat al-Furqan (25): 16,

لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مَسْئُولا

*Artinya:”Bagi mereka di dalam surga itu apa yang mereka kehendaki, sedang mereka kekal (di dalamnya). (Hal itu) adalah janji dari Tuhanmu yang patut dimintakan (kepada-Nya)”(Q.S. al-Furqan (25): 16).[[16]](#footnote-16)*

Pada ayat di atas kata مَسْئُولاً memiliki arti pertanggunganjawaban yang diminta, hubungannya dengan janji yang menjadi amanah dan tanggungjawabnya. Terminologi di atas dipertegas lagi dengan ayat yang 14 berisikan tentang kata yang menunjukkan angka dan ukuran yaitu kebinasaan sekali atau lebih banyak lagi لا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا.

Surat al-Ahzab (33): 15,

وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لا يُوَلُّونَ الأدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولا

*Artinya:”Dan sesungguhnya mereka sebelum itu telah berjanji kepada Allah: "Mereka tidak akan berbalik ke belakang (mundur)". Dan adalah perjanjian dengan Allah akan diminta pertanggungan jawabnya.”(Q.S. al-Ahzab (33): 15,[[17]](#footnote-17)*

Kata مَسْئُولاً di atas memiliki arti pertanggunganjawaban yang dituntut, hubungannya dengan janji yang menjadi amanah dan tanggungjawabnya. Terminologi di atas dipertegas lagi dengan dua ayat sebelum dan sesudahnya yang berisikan tentang kata yang menunjukkan arti jumlah sesuatu dan ukuran tertentu.وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلا يَسِيرًا dan لا تُمَتَّعُونَ إِلا قَلِيلا. Empat kata di atas berbentuk mufrad *(singular)* sedangkan yang berbentuk jamak *(plural)* مسئولون disebut hanya 1 kali dalam al-Qur’an yaitu:

Surat ash-Shaafat (37): 24,

وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ

*Artinya: ”Dan tahanlah mereka (di tempat perhentian) karena sesungguhnya mereka akan ditanya -pertanggungjawaban-*

*nya-. (Q.S.ash-Shaafat [37]: 24),[[18]](#footnote-18)*

Kata perihal pertanggungjawaban مَسْئُولُونَdi atas berhubungan dengan perbuatan kelompok orang yang hina dan mendustakan hari pembalasan dan melampaui batas dalam perbuatan dosa; تُكَذِّبُون ,دَاخِرُونَ قَوْمًا طَاغِينَ.

Sedangkan kata fi’il yang memiliki arti tanggungjawab disebut dalam al-Qur’an sebanyak *delapan belas* 18 kali yaitu:

Surat al-Hijr (15): 92-93,

فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ

*Artinya:”Maka demi Tuhanmu, Kami pasti akan menanyakan (pertanggungjawaban) mereka semua, tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu (Q.S. al-Hijr [15]: 92-93).[[19]](#footnote-19)*

Surat al A’raf (7): 6,

فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ

*Artinya:”Maka sesungguhnya Kami akan menanyai (pertanggungjawaban) umat-umat yang telah diutus rasul-rasul kepada mereka dan sesungguhnya Kami akan menanyai (pertanggungjawaban) pula dari rasul-rasul (Kami). (Q.S. al-A’raf [7]: 6).[[20]](#footnote-20)*

Kata فَلَنَسْأَلَنَّ وَلَنَسْأَلَنَّ pada ayat di atas menunjukkan arti diminta atau ditanya perihal pertanggungjawaban amal perbuatan yang terdahulu dari sekelompok umat setelah mereka mendapatkan pelajaran dan seruan dakwah dari para utusan Allah Ta’ala.

Surat an-Nahl (16):56 dan 93,

وَيَجْعَلُونَ لِمَا لا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ

*Artinya:”Dan mereka sediakan untuk berhala-berhala yang mereka tiada mengetahui (kekuasaannya), satu bahagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepada mereka. Demi Allah, sesungguhnya kamu akan ditanyai tentang apa yang telah kamu ada-adakan. (Q.S. an-Nahl [16]:56).[[21]](#footnote-21)*

Dan pada ayat ke 93 dinyatakan:

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

*Artinya:”Dan kalau Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat (saja), tetapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan.” (Q.S. an-Nahl [16]:93)[[22]](#footnote-22)*

Kata لتُسْأَلُنَّ وَلَتُسْأَلُنَّ, pada dua ayat di atas menunjukkan arti akan diminta dan ditanya perihal pertanggungjawaban perbuatan umat manusia berkenaan dengan penggunaan rezki yang telah Allah Ta’ala berikan kepada mereka.

Surat at-Takatsur (102): 8,

ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ

*Artinya: ”kemudian kamu pasti akan ditanyai pertanggungjawaban pada hari itu tentang kenikmatan (yang kamu megah-megahkan di dunia itu).” (Q.S. at-Takatsur [102]: 8).[[23]](#footnote-23)*

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan bahwa ayat ini diturunkan sebagai teguran berkenaan dengan dua kabilah anshar yang saling menyombongkan diri dengan harta-harta mereka. Dan kata لَتُسْأَلُنَّ artinya kalian kaum anshar sungguh pasti akan ditanya pertanggungjawaban akan sejumlah harta yang kalian peroleh dan yang menjadikan kalian bermegah-megahan dan sombong karenya.

Surat al-Baqarah (2); 134, 141,

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ

*Artinya:”Itu adalah umat yang lalu; baginya apa yang telah diusahakannya dan bagimu apa yang sudah kamu usahakan, dan kamu tidak akan diminta pertanggunganjawab tentang apa yang telah mereka kerjakan.”(Q.S. al-Baqarah [2]; 134).[[24]](#footnote-24)*

Redaksi ayat 134 dan 141surat al-Baqarah sama, pengulangan ayat yang sama dapat dimaknai sebagai *taukid*  yakni memperkuat statement ayat sebelumnya.

Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Ibnu Suriah mengatakan, hanya golongan kamilah yang mendapat petunjuk maka ikutilah kami. Umat saat itu diberi pilihan untuk menganut agama Yahudi atau Nashrani atau Islam dan sebagian mereka menganggap pilihan merekalah yang benar, padahal Rasululah Saw telah diutus dan membawa agama Islam yang *hanif*. Kata وَلا تُسْأَلُونَ artinya mereka kaum muslimin tidak akan ditanya perihal pertanggungjawaban dari amal perbuatan mereka yang memilih agama selain Islam.

Surat al-Anbiya (21);13,

لا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ

*Artinya:”Janganlah kalian lari tergesa-gesa; kembalilah kalian kepada nikmat yang telah kalian rasakan dan kepada tempat-tempat kediamanmu (yang baik), pasti kalian ditanya (akan tanggungjawab)”(Q.S. al-Anbiya [21];13).[[25]](#footnote-25)*

Kata *la’alla* pada potongan ayat لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ maknanya bukan للترجي atau harapan, tetapi mengandung makna للتثبيت أو للتيقنyaitu memastikan dan meyakinkan. Artinya bahwa kalian pasti akan ditanya atau diminta pertanggungjawaban akan negeri yang ditinggalkannya akibat kedzaliman mereka lalu Allah ta’ala menurunkan adzab atas mereka.

Surat Saba’ (34): 25,

قُلْ لا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ

*Artinya: “Katakanlah: "Kamu tidak akan ditanya (bertanggungjawab) tentang dosa yang kami perbuat dan kami tidak akan ditanya (pula) tentang apa yang kamu perbuat". (Q.S. Saba’ (34): 25).[[26]](#footnote-26)*

Surat az-Zukhruf (43): 44,

وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ

*Artinya:”Dan sesungguhnya al-Qur'an itu benar-benar adalah suatu kemuliaan besar bagimu dan bagi kaummu dan kelak kamu akan diminta pertanggungjawaban.” (Q.S. az-Zukhruf [43]: 44).[[27]](#footnote-27)*

Pada kata نُسْأَلُ dan kata تُسْأَلُونَ memiliki arti sama yaitu diminta pertanggungjawaban, yang *pertama* berkenaan dengan pernyataan kaum bahwa kita masing-masing bertanggungjawab atas perbuatan atau amal kita dan *kedua* kelompok kaum yang diminta pertanggungjawaban atas kalalaian mereka dan berpalingnya mereka dari ajaran al-Qur’an.

لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ[[28]](#footnote-28) وَلا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ[[29]](#footnote-29) فَيَوْمَئِذٍ لا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلا جَانٌّ[[30]](#footnote-30)

*Artinya:” Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuat-Nya, dan merekalah yang akan ditanyai.*

*Dan tidaklah ditanya kepada orang-orang yang berdosa itu, tentang dosa-dosa mereka.*

*Pada waktu itu manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya (orang lain).”*

Kata يُسْأَلُ لا pada tiga ayat di atas memiliki arti sama yaitu seseorang tidak ditanya atau diminta pertanggungjawaban atas perbuatan dosa orang lain yang mereka kerjakan, akan tetapi merekalah yang akan ditanya perihal perbuatan mereka sendiri.

Surat al-Anbiya (21): 23,

لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ

*Artinya:”Dia (Allah Ta’ala) tidak ditanya tentang apa yang diperbuat-Nya, dan merekalah yang akan ditanyai pertanggungjawabannya.” (Q.S. al-Anbiya (21): 23).[[31]](#footnote-31)*

Surat az-Zukhruf (43): 19.[[32]](#footnote-32)

وَجَعَلُوا الْمَلائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ

*Artinya:”Dan mereka menjadikan malaikat-malaikat yang mereka itu adalah hamba-hamba Allah Yang Maha Pemurah sebagai orang-orang perempuan. Apakah mereka menyaksikan penciptaan malaikat-malaikat itu? Kelak akan dituliskan persaksian mereka dan mereka akan dimintai pertanggungjawaban.” (Q.S. az-Zukhruf [43]: 19).*

.

Kata يُسْأَلُونَ pada dua ayat di atas memiliki arti sama yaitu ditanya atau diminta pertanggungjawaban tentang amal perbuatannya dan kesaksian mereka atas tuduhannya kepada para Malaikat yang didasari atas ketidakpahaman dan kebodohan mereka sendiri.

Sedangkan kata رعا- يرعا – رعيا - yang berarti tanggungjawab ditulis dalam bentuk *fi’il* yaitu surat al-Hadid (57): 27

فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ

*Artinya: ... lalu mereka tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yang semestinya. Maka Kami berikan kepada orang-orang yang beriman di antara mereka pahalanya dan banyak di antara mereka orang-orang fasik.[[33]](#footnote-33)*

Kata *ra’auha* dan *riayatiha* pada ayat di atas bermakna memelihara risalah dan agama dengan maksimal, penuh keyakinan dan sebaik mungkin sehingga kelompok yang demikian layak dan pantas untuk diberi ganjaran atau pahala atas usaha dan jerih payah mereka, walaupun masih banyak juga orang-orang yang memiliki karakter fasik.

Dalam bentuk isim yaitu; راعون terdapat dua tempat yaitu: al-Mukminun (23): 8, dan al-Ma’arij (70): 32 dalam redaksi yang sama, yaitu:

وَالَّذِينَ هُمْ لأمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

*Artinya: ”Dan orang-orang yang memelihara atau menjaga amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya.”(Q.S. al-Mukminun [23]: 8) dan al-Ma’arij (70): 32..[[34]](#footnote-34)*

Kata *ra’un* pada ayat di atas maksudnya adalah orang-orang yang menjaga, memelihara dan bertanggungjawab terhadap amanah-amanah dan janji mereka.

Kata lain yang bermakna tanggungjawab yaituزعيم terdapat dalam surat Yusuf (12): 72 dan surat al-Qalam (68): 40,.

قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ[[35]](#footnote-35)

سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ[[36]](#footnote-36)

*Artinya:”Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya".*

*Tanyakanlah kepada mereka: "Siapakah di antara mereka yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil itu?"*

Kata زعيم yang terdapat pada dua ayat di atas memiliki arti penjamin dan penanggungjawab, jadi bertanggungjawab atas perbuatan yang mengambil alat takaran milik raja atau penguasa di zamannya. Dalam bentuk fi’il disebutkan dalam al-Qur’an sebanyak 12 kali, yaitu: زعم at-Taghabun (64): 7, زعمت al-Isra’ (17): 92, زعمتم al-An’am (6): 94, al-Isra’ (17): 56, al-Kahfi (18): 48 dan 52, as-Saba (34): 22, al-Jumu’ah (62):6, dan تزعمون surat al-An’am (6):22 dan 94, al-Qashsash (28): 62 dan 74, serta يزعمون dalam surat an-Nisa’ (4): 60.

Selain kata مسؤول، مسؤولية، رعية، زعيم، رعية juga terdapat kosa kata lain yang dapat dimaknai pertanggungjawaban yaitu الأمانة dan الأمين,

Kata *amanah (mufrad)* dalam al-Qur’an di sebut sebanyak 2 kali; al-Baqarah (2) ayat 283 dan al-Ahzab (33): ayat 72 dan *amanat (jama’)*  di sebut sebanyak 4 kali; an-Nisa’ (4) ayat 58, al-Anfal (8) ayat 27, al-Mukminun (23) ayat 8, al-Ma’arij (70) ayat 32. Sedangkan kata *amin* atau *al-amin*  di sebut sebanyak 11 kali yaitu; al-A’raf (7) ayat 18, Yusuf (12) ayat 54, asy-Syu’ara (26) ayat 107, 125, 143, 162, 178, 193, an-Naml (27) ayat 39, al-Qashsash (28) ayat 26, ad-Dukhan (44) ayat 18,seperti firman Allah Ta’ala:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا..

*Artinya:”Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya,.. (Q.S. an-Nisa’ (4):58[[37]](#footnote-37)*

Dalam surat al-Anfal (8) ayat 27 disebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.(Q.S. al-Anfal (8): 27[[38]](#footnote-38)*

Kata الأمَانَاتِ pada ayat di atas berbentuk *jama' muannats salim* dari *mufrad-*nya الأمانة yang artinya amanah yang harus disampaikan dengan penuh tanggungjawab dan mencoba untuk mengkhianatinya. Berdasarkan ayat di atas mengkhianati amanah sama halnya dengan mengkhianati Allah Ta’ala dan Rasul-Nya Saw.

Berbeda dengan maksud di atas, dalam surat al-Mukminun (23): 8 kata *amanat* menjadi sifat dan indikasi dari orang-orang beriman -*mukminun-.* yang beruntung dan indikasi lain disebutkan sebelumnya adalah *khusyu’* dalam shalatnya, menjauhkan diri dari perbuatan sia-sia -*laghw-,* menunaikan ibadah zakat dan menjaga diri dari perbuatan *fawahisy*.

Sedangkan kata *amiin* dan *al-amiin* disebutkan dalam surat Al-A’raf (7): 18

أُبَلِّغُكُمْ رِسَالاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ

*Artinya:”Aku menyampaikan amanat-amanah Tuhanku kepadamu dan aku hanyalah pemberi nasihat yang terpercaya bagimu".[[39]](#footnote-39)*

Kata *amiin* pada ayat di atas terkait dengan pernyataan Nabi Hud As dihadapan kaumnya -*‘Ad-* yang ragu bahkan tidak percaya terhadap dirinya yang menjadi utusan Allah Ta’ala dan penyampai ajaran atau risalah-Nya.

Yusuf (12): 54

قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ

*Artinya: "Sesungguhnya kamu (mulai) hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi lagi dipercaya pada sisi kami"....[[40]](#footnote-40)*

Kata *amiin* pada ayat di atas terkait dengan pernyataan seorang Raja yang mengakui dan mempercayai akan eksistensi kesungguhan, kejujuran dan bentuk tanggungjawab Nabi Yusuf As sebagai bendahara kas –*Baitulmal-* negara yang amanah dalam menjalankan tugas yang dipercayakan kepadanya.

Asy-Syu’ara (26): 107, 125, 143, 162, 178

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ

*Artinya:”Sesungguhnya aku adalah seorang Rasul yang dapat dipercaya penuh tanggungjawab (diutus) kepadamu”.[[41]](#footnote-41)*

Kata *amiin* -dengan kata dan redaksi yang sama- dalam surat asy-Syu’ara di atas diulang sebanyak lima (5) kali; *pertama* terkait dengan pernyataan Nabi Nuh As kepada kaumnya, *kedua* pernyataan Nabi Hud As kepada masyarakat ‘Ad sebagai kaumnya, *ketiga* pernyataan Nabi Shaleh As kepada masyarakat Tsamud sebagai kaumnya, *keempat*  pernyataan Nabi Luth As kepada kaumnya di desa Sadum dan yang *kelima* pernyataan Nabi Syu’aib kepada kaumnya penduduk desa Aikah di Madyan.

Sedangkan pada ayat ke 193, kata *al-amiin* kedudukannya sebagai sifat atau na’at bagi ar-Ruh –sebutan lain dari Malaikat Jibril As- yang diberi tugas untuk menyampaikan al-Qur’an *wa innahu latanzilu Rabbil alamin.*

An-Naml (27): 39

وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ

*Artinya: “ ...Sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya lagi dapat dipercaya".[[42]](#footnote-42)*

Kata *amiin* pada ayat di atas merupakan pernyataan Jin kepada kelompok manusia untuk meyakinkan bahwa dirinya mampu dan bertanggungjawab untuk melakukan sesuatu yang di luar dugaan dan kemampuan manusia pada umumnya.

Al-Qashsash (28): 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأمِينُ

*Artinya:”Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya (bertanggungjawab)"..”(Q.S. al-Qashsash [28]:26)[[43]](#footnote-43)*

Kata الأمين yang terdapat pada ayat di atas berbentuk *isim*, asal kata *fi’il* dan *mashdar*-nya adalah أمن- يأمن- أمانة yang artinya: amanah, jujur, dapat dipercaya dan tanggungjawab. Kata الأمين pada ayat di atas artinya orang yang dipercaya (bertanggungjawab).

Kosa kata lain memiliki makna sama yaitu dan - محافظًة على الأمر حافظ-يحافظ-حفاظا =واظب عليه وراقبه وراعاه , احتفظ = اختصّ به, artinya memeliharanya dengan penuh tanggungjawab atas suatu perkara, menjaga, mengawasi, memantau dengan teliti dan hati-hati, menjaga dan memelihara secara fokus dan penuh tanggungjawab. *Shighat isim* dan *fi’il* yang berakar dari kata حفظ-يحفظ-حفظا sangat bervariasi di sebut dalam beberapa ayat yaitu:

= حفظ 1 kali dalam surat an-Nisa’ (4): 34, حفظناها = 1 kali dalam surat al-Hijr (15): 17, نحفظ = 1 kali dalam surat Yusuf (12): 65, يحفظن = 1 kali dalam surat an-Nur (24): 31, يحفظوا = 1 kali dalam surat an-Nur (24): 30, يحفظونه = 1 kali dalam surat ar-Ra’du (13): 11, احفظوا = 1 kali dalam surat al-Maidah (5): 89, يحافظون = 3 kali dalam surat al-An’am (6): 92, al-Mukminun (23): 9, al-ma’arij (70): 34, حافظوا = 1 kali dalam surat al-Baqarah (2): 238, استحفظوا = 1 kali dalam surat al-Maidah (5): 44, حفظا = 1 kali dalam surat ash-Shaaffat (37): 7, Fushshilat (41): 12, حفظهما = 1 kali dalam surat al-Baqarah (2): 255, حافظ = 1 kali dalam surat ath-Thariq (86): 4, حافظا = 1 kali dalam surat Yusuf (12): 64, حافظات = 2 kali dalam surat an-Nisa’ (4): 34, al-Ahzab (33): 35, حافظون = 6 kali dalam surat at-Taubah (9): 112, Yusuf (12): 12, 63, al-Hijr (15): 9, al-Mukminun (23): 5, al-Ma’arij (70): 29, حافظين = 5 kali dalam surat Yusuf (12): 81, al-Anbiya (21): 82, al-Ahzab (23): 35, al-Infithar (82): 10, al-Muthaffifin (83): 33, حفظة = 1 kali dalam surat al-An’am (6): 61, حفيظ = 8 kali dalam surat al-An’am (6): 104, Hud 911): 57, 86, Yusuf (12):55, Saba’ (34): 21, asy-Syura (42): 6, Qof (50): 4, 22, حفيظا = 3 kali dalam surat an-Nisa (4): 80, al-An’am (6): 107, Asy-Syura (42): 48, محفوظ = 1 kali dalam surat al-Buruj (85): 22

محفوظا = 1 kali dalam surat al-Anbiya’ (21): 32

Q.S. al-Hijr (15): 9

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

*Artinya:”Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan al-Qur'an, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya. (Q.S. al-Hijr [15]:9)[[44]](#footnote-44)*

Kata لَحَافِظُونَ pada ayat di atas berbentuk *jamak mudzakkar salim*

dari bentuk mufradnya yaitu حافظ berasal dari kata حفظ – يحفظ - حفظا

yang artinya memelihara, menjaga dengan penuh tanggungjawab terhadap *adz-dzikr* yang telah diturunkan kepada utusan-Nya.

Q.S. Yusuf (12): 12

أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

*Artinya:” Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia (dapat) bersenang-senang dan (dapat) bermain-main, dan sesungguhnya kami pasti menjaganya."*

Kata لَحَافِظُونَ pada ayat di atas adalah pernyataan saudara-saudara Nabi Yusuf As kepada ayah mereka bahwa mereka akan menjaga, memelihara dengan penuh tanggungjawab terhadap saudaranya yang diajak pergi dan sekaligus sebagai titipan orang tua kepada mereka.

Q.S. al-Ma’arij (70): 29

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ

*Artinya:”Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya,*

Kata لَحَافِظُونَ pada ayat di atas adalah mendeskripsikan salah satu karakter *mushallin* yaitu orang-orang beriman yang mereka istiqamah menjaga ibadah shalat mereka الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ دَائِمُونَ, maka mereka selalu berhati-hati menjaga, memelihara *furuj* mereka dari perbuatan *fawahisy* karena mereka paham dan sadar bahwa itu adalah bagian amanah yang akan dipertanggungjawabkan dihadapan Khaliknya.

Dalam hadits Nabi Saw kata yang bermakna pertanggungjawaban disebut dengan رعية dan penanggungjawab disebut dengan راع, seperti dalam salah satu hadits tentang tanggungjawab yaitu:

عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته والأمير راع والرجل راع على أهل بيته والمرأة راعية على بيت زوجها وولدها فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته (متفق عليه)

*Artinya: Dari Ibnu Umar ra dari Nabi SAW bersabda: setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian bertanggunjawab atas yang dipimpinnnya, seorang amir –pemimpin suatu wilayah- adalah pemimpin, suami adalah pemimpin pemimpin atas keluarganya, istri adalah pemimpin atas rumah tangga dan keluarganya, dan setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian bertanggungjawab atas yang dipimpinnya. (Muttafaqun ‘alaih).[[45]](#footnote-45)*

Hadits di atas menjelaskan beberapa jenis tanggungjawab yang hubungannya dengan sesama manusia sebagai pemimpin masyarakat, pemimpin rumah tangga dan pemimpin dalam segala hal. Dalam Islam bentuk pertanggungjawaban itu meliputi hubungannya dengan Allah Ta’ala atau حبل من الله dan tanggungjawab antar sesama manusia atau حبل من الناس .

1. **Kosep dan Teori Akuntabilitas**

Konsep akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi responsibilitas manajerial pada tiap tingkatan dalam organisasi bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada tiap klasifikasi bertanggungjawab atas setiap visi, misi, strategi dan kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan-kegiatan yang terkendali (*controllable* *activities*) dan kegiatan- kegiatan yang tidak terkendali (*uncontrollable* *activities*).

Akuntabilitas *(accountability)* yaitu berfungsinya seluruh komponen penggerak jalannya kegiatan perusahaan, sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing.  Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat.

Menurut *Dubnick,* akuntabilitas publik secara tradisional dipahami sebagai alat yang digunakan untuk mengawasi dan mengarahkan perilaku administrasi dengan cara memberikan kewajiban untuk dapat memberikan jawaban *(answerability)* kepada sejumlah otoritas eksternal. Menurut Romzek dan Ingraham akuntabilitas publik dalam arti yang paling fundamental merujuk kepada kemampuan menjawab kepada seseorang terkait dengan kinerja yang diharapkan.

Menurut *Elliot* akuntabilitas adalah cocok atau sesuai dengan yang diharapkan oleh orang lain, menjelaskan dan mempertimbangkan kepada orang lain tentang keputusan dan tindakan yang diambil. Akuntabilitas menurut *Lessinger*, adalah kajian hubungan antara apa yang sudah dilakukan sekolah dengan dana yang digunakan dengan hasil belajar yang diperoleh.

Menurut Turner dan Hulme, akuntabilitas merupakan konsep yang komplek yang lebih sulit mewujudkannya dari pada memberantas korupsi. Akuntabilitas adalah suatu keharusan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekan pada pertanggungjawaban horizontal (masyarakat) bukan hanya pertanggungjawaban vertikal (otoritas yang lebih tinggi).[[46]](#footnote-46)

Definisi akuntabilitas tersebut di atas memberikan suatu petunjuk sasaran pada hampir semua reformasi sektor publik dan mendorong pada munculnya tekanan untuk pelaku kunci yang terlibat untuk bertanggungjawab dan untuk menjamin kinerja pelayanan publik yang baik. Prinsip akuntabilitas adalah merupakan pelaksanaan pertanggungjawaban di mana dalam kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang terkait harus mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan  kewenangan yang diberikan di bidang tugasnya. Prinsip akuntabilitas terutama berkaitan erat dengan pertanggungjawaban terhadap efektivitas kegiatan dalam pencapaian sasaran atau target kebijakan atau program yang telah ditetapkan itu.

Adapun prinsip-prinsip akuntabilitas adalah:

1. Mengontrak performan artinya performan para petugas pendidikan dikontrak oleh orang-orang yang berkepentingan dalam pendidikan. Kriteria performan yang sudah disepakati bersama harus dapat dilaksanakan dengan baik.
2. Memiliki kunci pembentuk arah. Dengan biaya tertentu dan performan dengan kriteria yang sudah dikontrakan itu diharapkan pendidikan dapat mencapai tujuan secara tepat.
3. Ada unsur pemeriksaan. Pemerikasaan harus dilakukan oleh orang-orang yang bebas yang tidak terlibat dalam kegiatan pendidikan. Para pengontrak adalah merupakan unsur pengontrol dalam kegiatan pendidikan.
4. Ada jaminan pendidikan. Mutu pendidikan terjamin karena sudah memakai kriteria atau ukuran tertentu.
5. Pemberian insentif. Sebagai imbalan atas usaha dan kinerja guru dibuatlah insentif.

Aspek yang terkandung dalam pengertian akuntabilitas adalah bahwa publik mempunyai hak untuk mengetahui kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pihak yang mereka beri kepercayaan. Media pertanggungjawaban dalam konsep akuntabilitas tidak terbatas pada laporan pertanggungjawaban saja, tetapi mencakup juga praktek-praktek kemudahan pemberi mandat untuk mendapatkan informasi, baik langsung maupun tidak langsung secara lisan maupun tulisan. Dengan demikian, akuntabilitas akan tumbuh subur pada lingkungan yang mengutamakan transparansi atau keterbukaan sebagai landasan penting dan dalam suasana yang demokratis serta kebebasan dalam mengemukakan pendapat.

Akuntabilitas, sebagai salah satu prasyarat dari penyelenggaraan sebuah organisasi, didasarkan pada konsep organisasi dalam manajemen, yang menyangkut:

1. Luas kewenangan dan rentang kendali *(spand of control)* organisasi.
2. Faktor-faktor yang dapat dikendalikan *(controllable)* pada level manajemen atau tingkat kekuasaan tertentu.
3. Pengendalian sebagai bagian penting dari masyarakat yang baik saling menunjang dengan akuntabilitas. Dengan kata lain bahwa pengendalian tidak dapat berjalan dengan efesien dan efektif bila tidak ditunjang dengan mekanisme akuntabilitas yang baik, demikian pula sebaliknya.

Dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggung- jawaban secara periodik. Sumber daya ini merupakan masukan bagi individu maupun unit organisasi yang seharusnya dapat diukur dan diidentifikasikan secara jelas.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dari anggota organisasi sehingga tercapai kelancaran dan keterpautan dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Kegiatan-kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan dikendalikan oleh seseorang atau kelompok dan benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang mempunyai kendali tersebut. Manajemen suatu organisasi dapat dikatakan sudah akuntabel apabila dalam pelaksanaan kegiatannya telah memenuhi persyaratan: 1) menentukan tujuan yang tepat, 2) mengembangkan standar yang dibutuhkan untuk pencapaian tujuan, 3) secara efektif mempromosikan penerapan standar, 4) mengembangkan standar organisasi dan operasi secara efektif dan efesien.

Mario D. Yango mengelompokkan akuntabilitas ini menjadi beberapa bagian, yaitu:

1. *Akuntabilitas tradisional atau reguler*. Akuntabilitas yang memfokuskan kepada transaksi-transaksi regular atau fiskal dalam efisiensi administrasi publik menuju pelayanan prima.
2. *Akuntabilitas manajerial*. Akuntabilitas yang menitikberatkan kepada efisiensi biaya, kekayaan, sumber daya manusia dan sumber daya lain.  Diharapkan peranan manajer atau pengawas lebih baik terutama dalam menetapkan proses yang berkelanjutan sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik.
3. *Akuntabilitas program.* Akuntabilitas yang memfokuskan kepada pencapaian hasil operasi pemerintah.  Sangat diperhatikan sampai di mana pencapaian hasil, bukan sekedar cukup bahwa suatu program sudah dilaksanakan.
4. *Akuntabilitas proses.* Akuntabilitas yang memfokuskan kepada informasi mengenai tingkat kesejahteraan sosial. Diperlukan etika dan moral yang tinggi serta dampak positif pada kondisi sosial masyarakat.

Sedangkan Samuel Paul membagi akuntabilitas ke beberapa bagian, yaitu:

1. *Akuntabilitas demokratis*.  Pemerintah harus akuntabel atas kinerja semua kegiatannya kepada pemimpin politik yang telah mengangkatnya.
2. *Akuntabilitas profesional*. Para pakar dan teknokrat melaksanakan tugas senantiasa dilandasi oleh norma dan standar profesinya.
3. *Akuntabilitas hukum*. Ketentuan-ketentuan hukum disesuaikan dengan kepentingan publik yang dituntut oleh seluruh masyarakat.
4. *Akuntabilitas keuangan*. Integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap perundang-undangan. Sasarannya adalah laporan keuangan yang mencakup penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran keuangan instansi pemerintah.
5. *Akuntabilitas manfaat*. Terfokus kepada efektivitas, tidak sekedar pada kepatuhan terhadap prosedur, bukan hanya *outputs*, tapi sampai *outcomes*.
6. *Akuntabilitas prosedural*. Apakah suatu prosedur telah mempertimbangkan moralitas, etika, kepastian hukum dan ketaatan kepada keputusan politik.

Hambatan-hambatan akuntabilitas banyak ditemui dalam pelaksa-naan manajemen publik, yang berakibat terjadinya mal-manajemen.

Hambatan-hambatan itu antara lain:

1. *Law literacy percentage* (persentase kemampuan membaca yang rendah)
2. *Poor standard of living* (standar gaji yang rendah)
3. *General decline in the moral values*  (dekadensi moral)
4. *A policy of live and let live*  (manajemen "semau gue")
5. *Cultural factors* (hambatan kultural)
6. *Government monopoly*  (monopoli pemerintah)
7. *Deficiencies in the accounting system*  (buruknya sistem akuntansi)
8. *Lack of will in enforcing accountability* (tidak ada kemauan untuk melaksanakan akuntabilitas)
9. *Birocratic secrecy*  (kekakuan birokrasi)
10. *Conflict in perspective and inadequate institutional linkage* (konflik hubungan kelembagaan)
11. *Quality of officers*  (rendahnya kualitas SDM)
12. *Technological obsolescence and inadequate surveillance system* (ketertinggalan teknologi)
13. *Colonial heritage*  (mental jajahan)
14. *Defects in the laws concerning accountability*  (lemahnya aturan hukum)
15. *Environmental crisis*  (lingkungan yang kurang mendukung)
16. **Definisi Akuntabilitas Pendidikan**

Akuntabilitas pendidikan adalah kemampuan sekolah mempertanggungjawabkan kepada publik segala sesuatu mengenai kinerja yang telah dilaksanakan. Akuntabilitas dalam bidang pendidikan, seperti yang di katakan oleh Mc. Ashan, yaitu (1) program dan manajemen personalia yang mengarah kepada tujuan, (2) penekanan manajemen yang efektif dan efisien, (3) pengembangan program, pengembangan personalia, peningkatan hubungan dengan masyarakat dan kegiatan-kegiatan manajemen.[[47]](#footnote-47)

Azas otonomi yang dilaksanakan dalam bidang pendidikan dewasa ini harus disertai dengan adanya pertanggungjawaban terhadap berbagai pihak terkait. Oleh karena itu kemampuan suatu lembaga pendidikan untuk menjaga mutu pendidikannya sehingga dapat diterima masyarakat disebut akuntabilitas pendidikan.[[48]](#footnote-48) Konsep pertanggungjawaban dalam dunia pendidikan disebut dengan istilah akuntabilitas pendidikan. Sebenarnya peningkatan akuntabilitas merupakan tuntutan desentralisasi pendidikan.

Menurut Tilaar*,* desentralisasi mempunyai dua dimensi, yakni akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horisontal. Akuntabilitas vertikal menyangkut hubungan antara pengelola sekolah dengan masyarakat, sekolah dan orang tua siswa, sekolah dan instansi di atasnya (Dinas Pendidikan). Sedangkan akuntabilitas horizontal menyangkut hubungan antara sesama warga sekolah, antara kepala sekolah dengan komite, dan antara kepala sekolah dengan guru. Komponen pertama yang harus melaksanakan akuntabilitas adalah guru. Hal ini karena inti dari seluruh pelaksanaan manajemen sekolah adalah proses belajar mengajar. Dan pihak pertama di mana guru harus bertanggung jawab adalah siswa. Guru harus dapat melaksanakan ini dalam tugasnya sebagai pengajar.[[49]](#footnote-49)

Ken Jones menawarkan model akuntabilitas yang sudah sangat populer dan akrab pada dunia korporasi, *balance scorecard*. Dalam pendidikan, Jones mengatakan setidaknya terdapat empat komponen utama yang dapat dijadikan kriteria umum sebagai acuan untuk menentukan kesehatan sebuah organisasi sekolah, yang meliputi *(1) student learning, (2) opportunity to learn, (3) responsiveness to students, parents, and community, dan (4) organizational capacity for improvement.* Keempat unsur itu harus tampak dan dikerjakan secara simultan.

Menurut Jones*,* kita membutuhkan sebuah sistem sekolah yang (1) mampu menciptakan kondisi yang memungkinkan siswa belajar secara mandiri (*students learning*), (2) mampu menyelaraskan kurikulum sesuai dengan berbagai kebutuhan yang semakin beragam termasuk kebutuhan lokal atau kearifan lokal, (3) memberikan penekanan pada kegiatan belajar aplikatif, kemampuan berpikir (*thinking skills*) dan kemampuan untuk mendapatkan sesuatu yang baru *(discovery learning)* dan *declarative knowledge)* dan atau *basic skills,* (4) mampu menyatukan berbagai prinsip pengukuran dan penilaian pendidikan termasuk pemanfaatan berbagai format penilaian, termasuk *extended essays, open-response questions,* dan *performance-based tasks,* serta (5) mampu mengakomodasi siswa yang memiliki gaya belajar yang berbeda (*learning style*) dengan berbagai tingkatan inteligensi, kelebihan dan keterbatasan serta memiliki latar belakang kultural yang beragam.

Di samping itu, sistem sekolah juga dituntut memberikan peluang dan kesempatan secara adil kepada setiap siswa dalam memperoleh kesempatan belajar yang berkualitas (*opportunity to learn*). Dalam berbagai hasil studi dan penelitian, dikemukakan, kesempatan untuk mendapatkan pendidikan berkualitas bagi setiap individu anak masih sering terabaikan, terutama bagi kalangan masyarakat yang berpenghasilan rendah dan kurang mampu.

Pendidikan berkualitas dapat diwujudkan apabila sekolah memiliki tenaga pengajar yang berkualitas serta memiliki komitmen tinggi untuk memajukan pendidikan, tersedianya bahan ajar secara memadai (*adequate teaching materials*), fasilitas belajar yang memadai seperti laboratorium, perpustakaan dan media belajar. Kesempatan untuk memperoleh pendidikan berkualitas itu sebenarnya tidak selalu bergantung pada kondisi keuangan sekolah. Menurut Jeannie Oakes, yang lebih utama adalah bagaimana sistem sekolah mampu membukakan akses ke pintu gerbang ilmu pengetahuan, kesempatan untuk mendapatkan pengajaran dan pembelajaran secara profesional yang memberikan penekanan terhadap prestasi belajar akademis (*academic achievement*).

Perubahan penekanan konsep pembelajaran ke arah *student center* menuntut perubahan sikap (*attitudinal change*), perubahan paradigma berpikir dan akuntabilitas pendidikan. Sekolah seharusnya dapat mendorong dan memainkan peran utama dalam proses perubahan itu, khususnya dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban pendidikan yang lebih mengutamakan kepentingan siswa dan orang tua sebagai pemangku kepentingan utama pendidikan. Selain itu, sekolah berkewajiban memfasilitasi guru dalam setiap kegiatan pelatihan yang memungkinkan mereka dapat beradaptasi pada setiap perubahan dan perkembangan ilmu dan teknologi, pengetahuan serta mampu meningkatkan komunikasi pembelajaran secara efektif. Karena itu, sekolah harus secara ikhlas dan jujur (*sincere*) bersedia menciptakan proses akuntabilitas internal sebagai prasyarat dapat dibangunnya komitmen bersama untuk mewujudkan pendidikan bermutu dan berkualitas.

Fasli Jalal dan Dedi Supriadi menyatakan, bahwa upaya untuk mencapai akuntabilitas, sebuah institusi pendidikan memerlukan kurikulum yang relevan yang memperhitungkan kebutuhan masyarakat, kemampuan manajemen yang tinggi, komitmen yang kuat untuk mencapai keunggulan, sarana penunjang yang mamadai dan perangkat aturan yang jelas dan dilaksanakan secara konsisten oleh institusi pendidikan yang bersangkutan.[[50]](#footnote-50)

Empat hal penting yang dikemukakan di atas membutuhkan proses dan waktu yang tidak singkat. Sebab tidak saja dibutuhkan kemauan tetapi juga kemampuan untuk melaksanakannya. Dalam teori perubahan, orang dapat berubah, jika ia memiliki kemauan sekaligus kemampuan.

Akuntabilitas pendidikan juga mensyaratkan adanya manajemen yang tinggi. Di Indonesia telah lahir Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang bertumpu pada sekolah dan masyarakat. Model manajemen ini menuntut keterlibatan yang tinggi dari *stakeholder* sekolah. Susan Mohrmanmenyatakan, "Untuk mendukung pencapaian MBS telah muncul manajemen berpartisipasi tinggi yang membutuhkan empat sumber daya penting: 1) informasi, 2) pengetahuan, 3) keterampilan, 4) penghargaan dan sanksi. Empat sumber daya ini jika dikelola secara baik akan meningkatkan efektivitas manajemen sekolah dan efektifitas manajemen sekolah akan ditunjukkan dengan *output* yang berkualitas.

Akuntabilitas yang tinggi hanya dapat dicapai dengan pengelolaan sumber daya sekolah secara efektif dan efisien. Akuntabilitas tidak datang dengan sendiri setelah lembaga-lembaga pendidikan melaksanakan usaha-usahanya. Ada tiga hal yang memiliki kaitan, yaitu *kompetensi, akreditasi* dan *akuntabilitas*.[[51]](#footnote-51)

Lulusan pendidikan yang dianggap telah memenuhi semua persyaratan dan memiliki **kompetensi** yang dituntut berhak mendapat sertifikat. Lembaga pendidikan beserta perangkat-perangkatnya yang dinilai mampu menjamin produk yang bermutu disebut sebagai lembaga **terakreditasi (*accredited*).** Lembaga pendidikan yang terakreditasi dan dinilai mampu untuk menghasilkan lulusan bermutu, selalu berusaha menjaga dan menjamin mutuya sehingga dihargai dan diterima oleh masyarakat sebagai lembaga pendidikan yang **akuntabel**.

Institusi pendidikan yang akuntabel adalah institusi pendidikan yang mampu menjaga mutu keluarannya *(output)-*nya sehingga dapat diterima oleh masyarakat. Jadi, dalam hal ini akuntabel tidaknya suatu lembaga pendidikan bergantung kepada mutu *output-*nya. Di samping itu, akuntabilitas suatu lembaga juga bergantung kepada kemampuan suatu lembaga pendidikan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan kepada publik.

Menurut Slamet, Manajemen Berbasis Sekolah harus dipahami sebagai model pemberian kewenangan yang lebih besar kepada sekolah, yang meliputi kewenangan mengatur dan mengurus sekolah, mengambil keputusan, mengelola, memimpin dan mengontrol sekolah. Agar penyelenggara sekolah tidak sewenang-wenang dalam menyelenggarakan sekolah, maka sekolah harus bertanggung jawab terhadap apa yang dikerjakan. Untuk itu sekolah berkewajiban mempertanggungjawabkan kepada publik tentang apa yang dikerjakan sebagai konsekuensi dari mandat yang diberikan oleh publik. Itu berarti akuntabilitas publik menyangkut hak publik untuk memperoleh pertanggungjawaban penyelenggara sekolah.[[52]](#footnote-52)

Menurut Rita Headintong, akuntabiltas bukan hal baru, menurutnya:

*As far back as the 1830 when public was used to establish a national education system 'some were concerned that the spending of public money should be properly supervised and controlled, and others were dissatisfied with the practical aspects such as the poor quality of the teachers*'. [[53]](#footnote-53)

Pada tahun 1976 *Prime Minister Callaghan* mengusulkan bahwa pendidikan sudah seharusnya lebih akuntabel kepada masyarakat dan kecenderungan umum bahwa isu-isu pendidikan seharusnya terbuka telah membuka ruang bagi untuk menanggapinya, sekalipun itu bersifat non-profesional."[[54]](#footnote-54)

Di Indonesia, akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan, juga masih menempuh jalan panjang, ketika terjadi perubahan mendasar dalam sistem pendidikan, isu akuntabilitas sepertinya memdapatkan jalan lebih luas dan sekolah-sekolah sebagai basis penerapan manajemen pendidikan dituntut harus mampu mewujudkan akuntabilitas bagi publik.

Menurut Slamet "Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan penyelenggara organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewajiban untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.[[55]](#footnote-55) Sementara Zamroni mendefinsikan akuntabilitas " *Accountability is the degree to which local governments have to explain or justify what they have done or failed to do*." ("Akuntabilitas adalah tingkatan dimana pemerintah setempat harus bisa jelaskan atau memberikan alasan atas apa telah mereka kerjakan atau tidak jadi mereka kerjakan”). Lebih lanjut dikatakan bahwa "*Accountability can be seen as validation of participation, in that the test of whether attempts to increase participation prove successful is the extent to which people can use participation to hold a local government responsible for its action.*"[[56]](#footnote-56)

("Akuntabilitas dapat dilihat sebagai pengesahan dari keikutsertaan, Test, mencoba untuk meningkatkan keikutsertaan, membuktikan kesuksesan adalah luas dimana orang-orang dapat mempergunakan keikut sertaan untuk memegang satu tanggungjawab pemerintah setempat untuk tindakannya").

Pendapat Zamroni mengenai akuntabilitas dikaitkan dengan partisipasi, ini berarti akuntabilitas hanya dapat terjadi jika ada partisipasi dari *stakeholders* sekolah. Semakin kecil partisipasi *stakeholders* dalam penyelenggaraan manajemen sekolah, maka akan semakin rendah pula akuntabilitas sekolah tersebut.

Jadi dapat disimpulkan akuntabilitas adalah kemampuan sekolah mempertanggungjawabkan kepada publik segala sesuatu mengenai kinerja yang diperoleh sebagai hasil partisipasi dari *stakeholders*.

Rita Headington menyatakan *"Accountability has moral, legal and financial dimensions and operates at all levels of the education system."* [[57]](#footnote-57)

Ketiga dimensi yang terkandung dalam akuntabilitas, yaitu moral, hukum, dan keuangan menuntut tanggungjawab dari sekolah untuk mewujudkannya, tidak saja bagi publik tetapi pertama-tama harus dimulai bagi warga sekolah itu sendiri.

Headington menekankan akuntabilitas dari guru, sebagaimana yang dikemukakannya: *"Teacher have a moral and legal responsibility to provide appropriate educational experiences for pupils and to report to parents and other professionals. The head teacher and governing body have a legal responsibility to ensure the finances of the school are used effectively to benefit pupils' education."* Secara moral maupun secara formal (aturan) guru memiliki tanggung jawab bagi siswa maupun orang tua siswa untuk mewujudkan proses pembelajaran yang baik. Tidak saja guru tetapi juga badan-badan yang terkait dengan pendidikan, sebagaimana dikatakan oleh Headington. [[58]](#footnote-58) Untuk dan kepada siapa guru bertanggung jawab? Pertanyaan ini dijawab Headington:

"*Teachers are****, first and foremost****, accountable to their pupils. They are responsible for providing work which is interesting and challenging, maintaining pupils' involvement and helping them make progress in teir learning.* ***Secondly,*** *teachers are accountable to parents, both legally and morally, for the educational development of their children. The most evident mechanism for this through the formal reporting channel and through the provision of information about pupils' progress whenever necessary."* ***Thirdly****, teacher are accountable to their fellow professionals, in and beyond the school, through the provision of accurate and appropriate information from which pupils educational progress can be tracked, measured and compared. To in activities and discussion which develops shared professional understanding and enhances good practice.*"[[59]](#footnote-59)

("Guru adalah, terutama sekali, bertanggung jawab untuk murid mereka. Mereka adalah bertanggungjawab untuk menyediakan pekerjaan menarik dan menantang, memelihara keterlibatannya murid dan menolong mereka dalam kemajuan dipembelajaran mereka. Yang kedua, guru-guru bertanggungjawab kepada orang tua keduanya secara hukum dan moral, untuk pembangunan di bidang pendidikan anak-anak mereka. Mekanisme yang paling jelas untuk ini melalui saluran laporan formal dan melalui ketetapan dari keterangan kemajuan murid kapanpun diperlukan." Yang ketiga, guru bertanggungjawabkan untuk profesional pengikut mereka, dan berada di luar sekolah, melalui ketetapan dengan keterangan akurat dan sesuai dari murid yang mana kemajuan bidang pendidikan dapat dijejaki, diukur dan bandingkan. Untuk aktivitas dan bahasan yang dapat mengembangkan bagian profesional memahami dan menambahkan praktek yang baik").

Pendapat Headington memberi tekanan pada akuntabilitas kinerja pembelajaran. Di negara kita juga di negara-negara yang telah menerapkan MBS, terjadi kekacauan dalam memahami MBS, bahwa seringkali aspek pembelajaran dipahami terpisah dengan MBS. Hal ini sebenarnya telah diingatkan oleh David Mars, dalam Susan Mohrman, "*That change in the locus of decision-making within school based management should be designed and implemented as part of systemic reform-not as and innovation in and of it self. Conversely, avoid implementing SBM as an isolated innovation.*"[[60]](#footnote-60) (Perubahan itu pada tempat pembuatan keputusan dalam manajemen berbasis sekolah harus didesain dan diterapkan sebagai bagian dari sistem, mengubah bukan sebagai dan inovasi di dalam diri. Dan sebaliknya, menghindari pengimplementasian SBM sebagai satu inovasi terisolasi).

Apa yang dikatakan oleh David Mars merupakan sebuah peringatan keras akan bahaya kekacauan dalam penerapan manajemen berbasis sekolah. Bahwa MBS tidak dipahami sebagai sebuah inovasi yang terpisah dari pembelajaran. Jadi, kalau Rita Headington memberi tekanan akuntabiltas pada aspek pembelajaran yang dimotori oleh guru, maka sebenarnya ini adalah bagian hakiki dalam penerapan manajemen berbasis sekolah yang tidak boleh diabaikan oleh sekolah.

Sebenarnya peningkatan akuntabilitas merupakan tuntutan desentralisasi pendidikan. Menurut Tilaar, desentralisasi mempunyai dua dimensi, yakni akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horisontal. Akuntabilitas vertikal menyangkut hubungan antara pengelola sekolah dengan masyarakat, sekolah dan orang tua siswa, sekolah dan instansi di atasnya (kementerian agama dan atau dinas pendidikan). Sedangkan akuntabilitas horizontal menyangkut hubungan antara sesama warga sekolah, antara kepala sekolah dengan komite, dan antara kepala sekolah dengan guru. Komponen pertama yang harus melaksanakan akuntabilitas adalah guru, hal ini karena inti dari seluruh pelaksanaan manajemen sekolah adalah proses belajar mengajar. Dan pihak pertama -di mana guru harus bertanggung jawab- adalah siswa. Guru harus dapat melaksanakan ini dalam tugasnya sebagai pendidik.[[61]](#footnote-61)

Akuntabilitas dalam pendikan terdiri dari tujuan, manfaat, pelaksana, pelaksanaan, langkah-langkah dan faktor yang mempengaruhi dan upaya peningkatan akuntabilitas pendidikan.

1. **Definisi Pendidikan Islam**

Pendidikan adalah usaha yang bersifat mendidik, membimbing, membina, mempengaruhi dan mengarahkan dengan seperangkat ilmu pengetahuan. Sedangkan Islam adalah nama salah satu agama yang datang dari Allah Ta’ala yang ajaran-ajarannya bersumber dari wahyu al-Qur’an dan as-Sunnah[[62]](#footnote-62). Istilah pendidikan dalam konteks Islam telah banyak dikenal dengan menggunakan term yang beragam, yaitu *at-tarbiyah, at-ta’lim* dan *at-ta’dib.[[63]](#footnote-63)*

Pertama, *tarbiyah* dari Allah Ta’ala yang besifat khusus, yaitu taufiq serta pemeliharaan Allah yang diberikan kepada para wali-Nya hingga mereka menjadi lebih sempurna dalam keimanan dan terjaga dari penghalang-penghalang keimanan. Allah Ta’ala adalah *Rabbul-‘alamin*, yang salah satu pengertiannya ialah, Allah Ta’ala Pentarbiyah atau *Murabbi* segenap makhluk dengan segala nikmat-Nya.[[64]](#footnote-64) Kedua, tarbiyah dari Nabi Saw sehingga dengan penyampaian-penyampaian yang jelas serta bimbingan-bimbingan beliau, seseorang menjadi semakin memahami akan ajaran Islam dan semakin bertanggung jawab untuk mengamalkannya.

Tarbiyah, menurut Syaikh Abdurrahman Albaaniy yang dinukil oleh Syaikh Ali Hasan bin ‘Ali bin Abdul Hamid al-Halabiy[[65]](#footnote-65) adalah sebagai berikut: ”Kata *tarbiyah* terpulang pada tiga asal kata, yaitu: Pertama,رَبَا – يَرْبُو *(Rabâ – Yarbû)* yang artinya: tumbuh. Kedua,رَبِيَ – يَرْبَى *(Rabiya – Yarbâ)* yang artinya: berkembang. Ketiga, رَبَّ – يَرُبُّ *(Rabba – Yarubbu)* yang artinya: memperbaiki, mengurusi, mengatur dan memelihara. Dalam *Lisân al-‘Arab*, karya Ibn al-Manzhûr dikemukakan penjelasan berikut (tentang asal kata yang pertama): رَبَا الشَّيْءَ يَرْبُوْ رَبْوًا وَ رِبَاءً artinya: sesuatu itu bertambah dan tumbuh. *Arbaituhu,* artinya : aku menumbuhkannya. Dalam al-Qur’an al-Kariim, Allah berfirman : وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ “Allah menumbuh suburkan (pahala) sedekah”. (al-Baqarah/2:276). Dari makna inilah diambil pengertian Riba yang haram. Allah berfirman: وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia tumbuh pada harta manusia, maka riba itu tidak tumbuh (bertambah) pada sisi Allah”. (ar-Rûm/30:39).[[66]](#footnote-66)

Al-Ashma’iy berkata:قَدْ رَبَوْتُ فِى بنى فُلاَنٍ، أَرْبُوْ Artinya : Aku tumbuh (terbentuk) di tengah keluarga Bani Fulan. Sedangkan kalimat: رَبَّيْتُ فُلاَنًا أُرَبِّيْهِ تَرْبِيَةً *Rabbaitu Fulânan -Urabbi- Tarbiyyatan*, artinya: Aku menumbuh kembangkan (mentarbiyah atau mendidik) Fulan.[[67]](#footnote-67)

Adapun tentang asal kata: *Rabba – Yarubbu*, maka dalam *Lisân al’Arab*, Ibnu Manzhûr mengatakan: *Rabba Waladahu wash-Shabiyya – Yarubbuhu – Rabban. Wa Rabbabahu – Tarbîban wa Taribbatan;* maknanya: memperbaiki, mengurus dan memelihara seorang anak. Dalam hadits disebutkan: هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا. رواه مسلم “Apakah engkau mempunyai suatu kesenangan padanya yang dapat engkau pelihara?”.[[68]](#footnote-68) Maksudnya, (apakah engkau mempunyai) suatu kesenangan darinya yang dapat engkau jaga, engkau pelihara dan engkau tumbuh kembangkan seperti halnya seseorang menjaga dan menumbuhkembangkan anaknya?[[69]](#footnote-69)

Sementara itu dalam kitab Mufradât ar-Râghib al-Ashfahâniy dikemukakan penjelasan berikut: *Ar-Rabbu* berasal dari kata *tarbiyah.* Maknanya, membentuk sesuatu setahap demi setahap hingga mencapai kesempurnaan. Jadi kata *ar-Rabbu* merupakan mashdar (kata dasar) yang dipinjam untuk digunakan sebagai *fa’il* (pelaku perbuatan).

Sedangkan dalam *al-Qâmûs al-Muhîth* karya Fairuz Abadi dijelaskan: *Rabba al-Amra*, artinya memperbaiki urusan. *Rabba ash-Shabiyya,* artinya memelihara seorang anak hingga dewasa. *Rabautu fî Hijrihi –Rabwan- wa Rubuwwan*; demikian pula *Rabaitu Ribâ`an wa Rubiyyan,* artinya aku terbentuk pada asuhannya.

Menurut H. Ramyulis dalam al-Qur’an tidak ditemukan kata *al-tarbiyat,* namun terdapat istilah lain yang seakar dengannya, yaitu *al-rabb, rabbaya-ni, murabby, yurby* dan *rabbany*. Dalam as-Sunnah ditemukan kata *rabbaniy”*.[[70]](#footnote-70)

Abu al-A’la al-Maududi, seperti dikutif  Ramyulis berpendapat, bahwa kata *rabbun* (*rabba*) terdiri dari dua  huruf “ra” dan “ba” tasydid. Kedua kata itu  merupakan pecahan dari kata *tarbiyah* yang berarti “pendidikan, pengasuhan, dan sebagainya”. Kata tersebut juga memiliki beragam arti antara lain: “kekuasaan, perlengkapan, pertanggungjawaban, perbaikan, penyempurnaan, dan lain-lain”. [[71]](#footnote-71) Mushtafa al-Maraghy, menyatakan kata itu merupakan predikat bagi suatu “kebesaran, keagungan, kekuasaan, dan kepemimpinan”.[[72]](#footnote-72)

M. Abdurra’uf Al-Munawy mendefinisikan tarbiyah sebagai berikut: التربية: إنشاء الشيء حالاً فحالاً إلى حد التمام “Tarbiyah adalah menciptakan atau membentuk sesuatu dari satu keadaan ke keadaan -bentuk- lainnnya hingga batas sempurna”.[[73]](#footnote-73)

Dari beberapa makna di atas, ada makna yang mendekatkan kata tarbiyah menuju pengertian secara istilah, yaitu perkataan Imam al-Baidhâwiy dalam kitab tafsirnya yaitu:*Anwâr at-Tanzîl wa Asrâr at-Ta’wîl: Ar-Rabbu* asalnya bemakna tarbiyah, yaitu menjadikan sesuatu sampai pada kesempurnaannya sedikit demi sedikit. Kemudian Allah SWT disifati dengan kata *Rabb* ini untuk menunjukkan *mubalaghah* (sangat maksimal dalam meningkatkan makhluk-Nya menjadi sempurna). Sebelumnya juga telah dijelaskan perkataan ar-Râghib al-Ashfahâniy, bahwa *ar-Rabb* asalnya dari kata *tarbiyah,* yang maknanya, membentuk sesuatu setahap demi setahap hingga mencapai kesempurnaan.

Dengan demikian, dari makna tarbiyah dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Murabbi atau pendidik sebenarnya secara mutlak adalah Allah Ta’ala, karena Dia-lah *al-Khaliq*. Pencipta fitrah dan Penganugerah berbagai bakat manusia. Dia pula yang yang telah menyediakan jalan bagi tumbuh, berkembang dan bekerjanya fitrah serta bakat-bakat manusia secara bertahap. Dia-lah yang telah menetapkan syari’at agar fitrah-fitrah itu tumbuh semakin sempurna, bagus dan menjadi berbahagia.
2. Maka tarbiyah atau pendidikan harus dilakukan sejalan dengan cahaya syari’at Ilahi dan selaras dengan hukum-hukum syari’at Ilahi.
3. Tarbiyah juga harus dijalankan secara terencana dan bertahap di mana tahap yang satu berpijak pada tahap yang lain, dan tahap yang sebelumnya menjadi dasar bagi persiapan tahap berikutnya.
4. Aktifitas seorang murabbi atau pendidik harus mengikuti fitrah yang ditetapkan Allah dan harus mengikuti syari’at serta hukum-hukum Allah”.

Jadi makna dan *hakikat tarbiyah* secara istilah ialah: “Kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan cara-cara dan sarana-sarana yang tidak bertentangan dengan syari’at Islam untuk maksud memelihara serta membentuk seseorang menjadi pemimpin di muka bumi dengan kepemimpinan yang di atur berdasarkan peribadatan hanya kepada Allah saja secara sempurna.

Sementara itu Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu mengatakan:“Asas-asas tarbiyah dalam masyarakat Islam berdiri dalam rangka mewujudkan aqidah yang benar, perasaan-perasaan yang mulia dan adab-adab yang tinggi. Hal ini tercermin pada hubungan antara anak didik dengan *Rabb*-nya, dengan pendidiknya, dengan kawannya, dengan kantor lembaga pendidikannya dan kemudian dengan lingkungan keluarganya”.[[74]](#footnote-74)

Dari sini, dapat diketahui bahwa hakikat tarbiyah yang benar bertumpu pada tiga hal penting:

*Pertama:* Tarbiyah harus memusatkan perhatiannya untuk membangkitkan aqidah tauhid serta membersihkan kehidupan umat dari berbagai bid’ah dan penyimpangan sebagai pendahuluan agar umat kelak mampu memikul Islam kembali.

*Kedua:* Parameter tarbiyah yang benar ialah bila tarbiyah tersebut berdiri pada landasan al-Qur`ân dan as-Sunah, terjalin dengan praktik keseharian para Salaf, serta terbangun kembali semangat generasi umat untuk menggali al-Qur`ân dan as-Sunnah hingga mampu memahami dan mengambil istinbath hukum. Tentu saja dengan mengambil petunjuk secara utuh pada pemahaman *salaf shalih* dan terus berkonsultasi dengan para *Ulama Rabbani* yang benar-benar menguasai al-Qur`an dan as-Sunah.

*Ketiga:* Tarbiyah tidak dapat dipisahkan dari upaya terus menerus dalam memberi pengarahan kepada masyarakat secara umum. Sebab hakikat tarbiyah serta hasilnya selalu berkaitan erat dengan kehidupan keseharian masyarakat, baik yang menyangkut keyakinan, norma, tradisi, hubungan sosial, politik, ekonomi, hukum dan lain-lain.

Kesimpulannya, jika makna dan hakikat tarbiyah sudah jelas, maka tujuan tarbiyahpun menjadi jelas, yaitu membentuk umat, baik secara individu maupun secara kolektif menjadi umat yang bertanggung jawab memenuhi hak-hak Allah, memenuhi hak-hak makhluk sesuai dengan ketentuan Allah, menjauhi segala macam khurafat, kemaksiatan serta penyimpangan-penyimpangan lain, sehingga ia mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan dan lebih dari itu ia akan akan mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan di akhirat *al-hasanah fi ad-dunia wa al-hasanah fi al-akhirah*. Intinya menjadi umat yang beribadah hanya kepada Allah saja, sesuai dengan tujuan diciptakannya jin dan manusia.[[75]](#footnote-75) Umat yang lebih mementingkan kehidupan akhirat dari pada dunia dan selalu memikirkan bagaimana selamat dan sukses di akhirat dengan tidak melupakan bagiannya untuk kehidupan di dunia,[[76]](#footnote-76) tetapi tidak menjadi tergantung padanya.

Imam Ibnu al-Qayyim az-Zauji mengatakan: Didalamnya   
terdapat sesuatu yang harus diperhatikan oleh para ulama, yaitu hendaknya mereka mendidik umat seperti halnya seorang ayah mendidik anaknya. Maka hendaknya para ulama mendidik umat secara bertahap dan meningkat dari ilmu yang sederhana hingga yang tinggi. Hendaknya mereka membawa umat secara bertahap menurut kemampuan, seperti yang dilakukan seorang ayah terhadap anaknya ketika menyuapkan makanan.[[77]](#footnote-77)

Alangkah indahnya jika tarbiyah atau pendidikan, baik formal maupun non formal, berorientasi pada ibadah hanya kepada Allah Ta’ala, dengan senantiasa berpedoman pada petunjuk-petunjuk yang berlandaskan al-Qur`ân dan as-Sunnah dengan pemahaman para salaf shalih serta senantiasa berkonsultasi dengan para *Ulama Rabbani*. Sebab mereka adalah *Waratsat al-Anbiya* dan sebagai pendidik umat sesungguhnya sesudah Nabi Saw.

Karena itulah, berkaitan dengan hadits:

إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم

*Artinya:”Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para Nabi”. (H.R. Abu Dawud, Turmudzi, Ibnu Majah dan lainnya)[[78]](#footnote-78)*

Maka pendidik yang baik dan sempurna adalah mereka yang mengikuti cara Nabi Saw dalam dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik yang menanamkan tauhid, akhlak mulia dan disiplin ilmu lainnya.

Pendidikan adalah suatu upaya peningkatan yang terencana dalam proses pembelajaran dan merupakan kelengkapan kebutuhan manusia yang sangat penting dalam kehidupannya. Pendidikan merupakan suatu proses kegiatan untuk mengubah sikap dari suatu kondisi tertentu kearah yang lebih baik dengan berusaha melatih akal, hati dan tangan atau ilmu yang menumbuhkan pengetahuan, kesediaan-kesediaan, kebolehan-kebolehan akal pelajar.[[79]](#footnote-79) Mensucikan hatinya dan menguatkan perasaan agamanya dan menambahkan imannya dan rasa takutnya kepada Allah Ta’ala. Ini karena ia membuka rahasia undang-undang dan keajaiban dalam alam jagat yang menunjukkan adanya Pencipta Yang Maha Bijaksana dan atas keesaannya dan kekuasaannya.[[80]](#footnote-80)

Kata *Rabb* di dalam al-Qur’an diulang sebanyak 169 kali dan dihubungkan pada obyek-obyek yang sangat banyak. Kata *Rabb* ini juga sering dikaitkan dengan kata alam, sesuatu selain Tuhan. Pengkaitan kata *Rabb* dengan kata alam tersebut seperti pada surat al-A’raf (7): 61,

قَالَ يَاقَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلاَلَة ٌ وَلَكِنِّي رَسُول ٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ

*Artinya: “Nuh menjawab: hai kaumku, tak ada padaku kesesatan sedikitpun tetapi aku adalah utusan Tuhan semesta alam.”[[81]](#footnote-81)*

Juga seperti dalam surat al-Fatihah (1): 2, الحمد لله رب العالمين dan terkadang

dikaitkan dengan kata al-Falaq, an-Nas قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس dan lain-lain.

Pendidikan diistilahkan dengan  *ta’dib,* yang berasal dari kata kerja *“addaba”.* Kata *at-ta’dib* diartikan kepada proses mendidik yang lebih tertuju pada pembinaan dan penyempurnaan akhlak atau budi pekerti peserta didik.[[82]](#footnote-82) Kata ta’dib tidak dijumpai langsung dalam al-Qur’an, tetapi pada tingkat operasional, pendidikan dapat dilihat pada praktek yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasul sebagai pendidik agung dalam pandangan pendidikan Islam, sejalan dengan tujuan Allah mengutus beliau kepada manusia yaitu untuk menyempurnakan akhlak.[[83]](#footnote-83) Allah juga menjelaskan, bahwa sesungguhnya Rasul adalah sebaik-baik contoh teladan bagi kamu sekalian.

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَة ٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرا

*Artinya: “Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah*”.[[84]](#footnote-84)

Selanjutnya Rasulullah Saw meneruskan wewenang dan tanggung jawab tersebut kepada kedua orang tua selaku pendidik kodrati. Dengan demikian status orang tua sebagai pendidik didasarkan atas tanggung jawab keagamaan, yaitu dalam bentuk kewajiban orang tua terhadap anak, mencakup memelihara dan membimbing anak dan memberikan pendidikan akhlak kepada keluarga dan anak-anak.

Pendidikan disebut dengan *ta’lim* yang berasal dari kata *‘allama* berkonotasi pembelajaran yaitu semacam proses transfer ilmu pengetahuan. Kaitannya dengan pendidikan *ta’lim* dipahami sebagai proses bimbingan yang dititikberatkan pada aspek peningkatan intelektualitas peserta didik.[[85]](#footnote-85) Proses pembelajaran ta’lim secara simbolis dinyatakan dalam informasi al-Qur’an ketika penciptaan Adam As oleh Allah Swt. Adam As sebagai cikal bakal dari makhluk berperadaban (manusia) menerima pemahaman tentang konsep ilmu pengetahuan langsung dari Allah Swt, sedang dirinya (Adam As) sama sekali belum tahu apa-apa. Sebagaimana tertulis dalam surat al-Baqarah ayat 31 dan 32:

وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلاَئِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَاؤُلاَء إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ 

*Artinya: “Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman: “Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar.”[[86]](#footnote-86)*

قَالُوا سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

*Artinya: “ Mereka menjawab, “Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”[[87]](#footnote-87)*

Dari ketiga konsep diatas, terlihat hubungan antara *tarbiyah, ta’lim* dan *ta’dib*. Ketiga konsep tersebut menunjukkan hubungan teologis  (nilai tauhid) dalam pendidikan Islam sesuai al-Qur’an yaitu membentuk akhlak karimah.

M. Abbas mendefinisikan pendidikan *–tarbiyah-* yaitu:

التربية تعني: " تغذية الجسم وتربيته بما يحتاج إليه من مأكل ومشرب

ليشّب قوياً معافى قادراً على مواجهة تكاليف الحياة ومشقاتها. فتغذية الإنسان والوصول به إلى حد الكمال هو معنى التربية، ويقصد بهذا المفهوم كلّ ما يُغذي في الإنسان جسماً وعقلاً وروحاًوإحساساً ووجداناً وعاطفة "[[88]](#footnote-88)

*“Tarbiyah adalah memberikan konsumsi raga –badan- berupa makanan dan minuman dan pendidikan sesuai kebutuhan agar supaya tumbuh menjadi remaja-pemuda- kuat sehat, mampu memikul beban dan siap menghadapi kesulitan hidup, membekali manusia untuk dapat mencapai kesempurnaan, maksudnya adalah bahwa semua yang diberikan untuk petumbuhan dan kesempurnaan raga, akal, ruh, indra, rasa dan simpati”.*

Sedangkan A. M. Husein menjelaskan makna tarbiyah yaitu:

والتربية تعني: الرعاية والعناية في مراحل العمر الأدنى، سواء كانت هذه العناية موجهة إلى الجانب الجسمي أم موجهة إلى الجانب الخُلقي الذي يتمثل في إكساب الطفل أساسيات قواعد السلوك ومعايير الجماعة التي ينتمي إليها[[89]](#footnote-89)

*“Pendidikan -tarbiyah- adalah pemeliharaan dan tuntunan perhatian -khusus- pada fase-fase usia dini, baik tuntunan perhatian itu diberikan untuk kebutuhan jasmani maupun ruhani -khulqi- yang tercermin pada usaha pembentukkan anak memalui dasar-dasar atau pondasi pembentukkan -arah kehidupan- individu dan kolektif yang menjadi tempat dan arah pertumbuhan berkembangnya”.*

Secara terminologis, disebutkan dalam Undang-Undang Nomor:  20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada Pasal 1 angka 1, bahwa: “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.

Jika dicermati, beberapa pengertian pendidikan di atas maka terdapat benang merah kesamaan definisi pendidikan. Pengertian pendidikan yang dirumuskan M. Athiyah memiliki titik persamaan dengan penger­tian D. Marimba. Pengertian pendidikan ini hampir serupa dengan yang didefinisikan oleh An-Nahlawi, bahwa pendidikan Islam adalah pengembangan pikiran manusia dan penataan tingkah laku serta emosinya berdasarkan agama lslam, dengan maksud merealisasikan tujuan Islam di dalam kehidupan individu dan masyarakat, yakni dalam seluruh lapangan kehidupan. Berbeda dengan beberapa definisi di atas, al-Attas mendefinisikan pendidikan agak abstrak dan mengandung makna yang filosofis sekali, akan tetapi ke­semuanya itu semakin menambah perbendaharaan kekaya­an khazanah pendidikan Islam. Dari definisi-definisi itu jika ditelaah mengandung tiga unsur utama, yaitu pendidik yang bertanggung jawab dan berwibawa, peserta didik yang memiliki kedaulatan, serta tujuan akhir, berupa terciptanya manusia yang baik, yang dalam istilah al-Attas *insan kamil.*

Dalam GBHN pendidikan pada hakikatnya adalah usaha sadar untuk mengembangkan di dalam dan di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup, kepribadian dan kemampuan. Pendidikan tidak terlepas dari berbagai faktor-faktor sebagai berikut: pendidik, anak didik, materi, metode, media dan evaluasi.[[90]](#footnote-90)

Menurut John Dewey pendidikan ialah suatu proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional ke arah alam dan sesama manusia. Menurut Langeveld mendidik ialah mempengaruhi anak dalam usaha membimbingnya supaya menjadi dewasa. Usaha membimbing adalah usaha yang disadari dan dilaksanakan dengan sengaja dan pendidikan hanya terdapat dalam pergaulan dan aktivitas yang disengaja antara orang dewasa dengan anak.

1. **Falsafah Pendidikan Islam**

Falsafah pendidikan Islam adalah pikiran, pandangan, dan renungan manusia tentang suatu proses transformasi dan usaha pengembangan bakat serta kemampuan seseorang, baik aspek kognitif, afektif, psikomotorik, maupun akhlak pribadi untuk menetapkan status, kedudukan dan fungsi di dunia dan di akhirat kelak. Oleh karena itu, pendidikan dalam ajaran Islam merupakan suatu proses penyampaian informasi (berkomunikasi) yang kemudian diserap oleh masing-masing individu yang dapat menjiwai cara berfirkir, bersikap dan bertindak, baik untuk dirinya, hubungannya dengan Allah Ta’ala, hubungannya dengan sesama manusia maupun makhluk lain di alam semesta dalam kedudukannya sebagai hamba dan khalifah Allah di bumi dan cendikiawan dan atau ulama sebagai penerus misi risalah Nabi Saw..

Apabila diperhatikan, lembaga pendidikan Islam terus mengalami perkembangan sejalan dengan sejarah kehidupan manusia, yang ditandai dengan tumbuh berkembangnya institusi pendidikan Islam, yaitu pesantren *(ma’had)*, madrasah *(madrasah),* kemudian muncul sekolah Islam bahkan Perguruan Tinggi atau Universitas Islam *(al-Jami’ah al-Islamiah).*

Pendidikan agama Islam menekankan penguatan iman kepada Allah pada peserta didik, prinsip-prinsip Islam yang bisa menguatkan keyakinan, memperbaiki akhlak dan sikap. Maka dari itu pendidikan Islam mengambil pelajaran bagaimana membina sikap keimanan pada setiap individu peserta didik. Di antara cara yang paling utama adalah: merenungkan dan memikirkan kekuasaan Allah dan keimanan serta keindahan.[[91]](#footnote-91) Hal ini seperti yang terkandung dalam al-Qur’an:

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

*Artinya:” Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) Kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al Quran itu adalah benar. Tiadakah cukup bahwa Sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu. (Al Fusshilat /Ha Mim Sajadah): 53)[[92]](#footnote-92)*

Ayat di atas menekan manusia agar selalu beriman kepada Allah dan mempelajari al-Qur’an yang menjadi panutan dan dasar dari agama Islam serta panutan manusia menuju kebenaran yang abadi di dunia dan ahirat. Pembentukan sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari, dapat ditandai dengan karakteristik pendidikan, yaitu tidak hanya mengajarkan atau mentransformasikan ilmu dan keterampilan serta kepekaan rasa dan atau agama, melainkan pendidikan seharusnya memberi perlengkapan kepada anak didik untuk memecahkan persoalan yang sudah tampak sekarang maupun yang akan terjadi di masa mendatang.

Di satu sisi yang dipandang sebagai profesional yang terikat kepada kode etik profesinya atau terikat dari komitmen batin antara dirinya dengan Allah dan di pihak lain kewajiban kemanusiaan yang secara sadar dan ikhlas memandang usaha tersebut sebagai langkah yang bermanfaat bagi sesama manusia dan lingkungannya. Oleh karena itu pendidikan agama Islam mesti berorientasi ke masa akan datang, karena sesungguhnya anak didik masa kini adalah pendidik di masa yang akan datang. Nabi Saw memerintahkan dalam satu haditsnya:

علموا أولادكم فإنهم مخلوقون لزمان غير زمانكم (رواه مسلم)

*Artinya: “Didiklah anak-anak kalian, sesungguhnya mereka diciptkan untuk zaman yang tidak sezaman dengan kalian”. (H.R. Muslim)[[93]](#footnote-93)*

Maksud dari hadits tersebut berorientasi kepada usaha pendidikan agama Islam yang diproyeksikan kepada:

* 1. Pembinaan ketakwaan dan perilaku terpuji yang dijabarkan di dalam pembinaan kompetensi enam aspek keimanan, lima aspek keislaman dan multi aspek keihsanan.
  2. Mempertinggi kecerdasan dan kemampuan anak didik.
  3. Memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi serta manfaat dan aplikasinya.
  4. Meningkatkan kualitas hidup.
  5. Memelihara, mengembangkan dan melestarikan budaya dan lingkungan.
  6. Memperluas pandangan hidup sebagai manusia yang komunikatif terhadap keluarga, masyarakat, bangsa, sesama manusia dan makhluk hidup lainnya.

* + - 1. **Ontologi Pendidikan Islam**

Ontologi terdiri dari dua suku kata, yaitu *ontos* dan *logos*. *Ontos* berarti sesuatu yang berwujud dan *logos*berarti ilmu. Jadi ontologi dapat diartikan sebagai ilmu atau teori tentang wujud hakikat yang ada.[[94]](#footnote-94) Dalam konsep filsafat ilmu Islam, segala sesuatu yang ada ini meliputi yang nampak dan yang tidak nampak (metafisika).

Metafisika sebagai cabang filsafat mengenai kenyataan (realitas) berusaha mencari hakikat sesuatu. Karena usahanya mencari hakikat, maka timbullah ilmu-ilmu keagamaan atau ketuhanan, dan yang berhubungan dengan masalah apa.[[95]](#footnote-95)

Ontologi pendidikan Islam membahas hakikat substansi dan pola organisasi pendidikan Islam. Secara ontologis, Pendidikan Islam adalah hakikat dari kehidupan manusia sebagai makhluk berakal dan berpikir. Jika manusia bukan makluk berpikir, tidak akan ada pendidikan. Selanjutnya pendidikan sebagai usaha pengembangan diri manusia, dijadikan alat untuk mendidik.[[96]](#footnote-96)

Kajian ontologi ini tidak dapat dipisahkan dengan Sang Maha Pencipta. Allah telah membekali beberapa potensi kepada kita untuk berpikir. Pertanyaan selanjutnya apakah sebenarnya hakikat pendidikan Islam itu? Tiga kata kunci tentang pendidikan Islam yaitu:

1. *Ta’lim,*kata ini telah digunakan sejak periode awal pelaksanaan pendidikan Islam. Mengacu pada pengetahuan, berupa pengenalan dan pemahaman terhadap segenap nama-nama atau benda ciptaan Allah. Rasyid Ridha, mengartikan *ta’lim* sebagai proses transmisi berbagai ilmu pengetahuan pada jiwa individu tanpa adanya batasan dan ketentuan tertentu.
2. *Tarbiyah*, kata ini berasal dari kata *Rabb*, mengandung arti memelihara, membesarkan dan mendidik yang kedalamannya sudah termasuk makna mengajar.[[97]](#footnote-97)
3. *Ta’dib,* Syekh Muhammad Naquib al-Attas mengungkapkan istilah  yang paling tepat untuk menunjukan pendidikan Islam adalah *al-ta’dib*, kata ini berarti pengenalan dan pengakuan yang secara berangsur-angsur ditanamkan ke dalam diri manusia (peserta didik) tentang tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu di dalam tatanan penciptaan.[[98]](#footnote-98)

Dari ketiga kata kunci di atas, berbagai pakar telah merumuskan tentang pendidikan Islam, sebagai berikut:

1. D. Marimba mengatakan bahwa pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani dan rohani menuju terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam.[[99]](#footnote-99)
2. Yusuf al-Qardawi mengatakan bahwa pendidikan Islam adalah pendidikan manusia seutuhnya akal dan hatinya, rohani dan jasmaninya, akhlak dan keterampilannya.
3. Ahmad Tafsir mendefinisikan pendidikan Islam sebagai bimbingan yang diberikan oleh seseorang agar ia berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam.

Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam adalah suatu sistem yang dapat mengarahkan kehidupan peserta didik sesuai dengan ideologi Islam.

Dengan demikian secara ontologis pemahaman terhadap pendidikan Islam tidak dapat dipisahkan dengan Allah selaku Pencipta manusia. Karena pendidikan Islam ditujukan pada terbentuknya kepribadian muslim yang dapat memenuhi hakikat penciptaannya, yakni menjadi pengabdi Allah sesuatu hal yang penting bagi manusia.

Baca firman Allah Ta’ala pada surat *adz-Dzariyat* (51) ayat 56 yang substansinya tentang tujuan utama penciptaan bangsa jin dan manusia yaitu hanya mengabdi kepada-Nya, -إلا ليعبدون-.

Firman Allah Ta’ala dalam surat Ali Imran:

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ

*Artinya:”Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang Rasul dari golongan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan (jiwa) mereka, dan mengajarkan kepada mereka Al-Kitab dan Al-hikmah. Dan sesungguhnya sebelum (kedatangan Nabi) itu, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata.* *(Âli-‘Imrân [3]:164).[[100]](#footnote-100)*

Kandungan dari ayat di atas adalah pendidikan atau tarbiyah yang berasal dari Allah, melalui guru, membersihkan (memperbaiki) akal, hati dan fisik, ada kedekatan emosional antara subyek dan obyek tarbiyah.

* + - 1. **Epistemologi Pendidikan Islam**

Epistemologi berasal dari kata *episteme*yang berarti pengetahuan dan *logos*yang berarti ilmu. Jadi epistemologi adalah ilmu yang membahas tentang pengetahuan dan cara memperolehnya. Dengan kata lain, epistemologi adalah suatu cabang filsafat yang menyoroti atau membahas tentang tata cara, teknik, atau prosedur mendapatkan ilmu dan keilmuan.[[101]](#footnote-101)

Dunia manusia nyaris selalu menjadi dunia pendidikan. Dalam pengertian ini, dunia senantiasa mengakui pendidikan adalah sesuatu hal yang penting. Hal ini didasarkan pada beragam tujuan nilai, termasuk salah satunya yang utama adalah tujuan-tujuan etis: untuk membuat manusia manjadi lebih baik. Pandangan ini kemudian dilengkapi dengan berbagai penjelasan bahwa pendidikan kemudian mempercayai instrument utama guna mendidik manusia. Pendidikan mempercayai bahwa dengan membuat manusia menjadi berpengetahuan akan menjadi baik.

Dari pendapat tersebut, terdapat pandangan yang mengatakan bahwa tanpa pengetahuan, dunia manusia tidak akan pernah sungguh-sungguh mampu berdiri menjadi dunia. Sebaliknya ia akan menjadi ruang lengang, tempat ribuan pasang mata hidup dalam situasi yang begitu mati dan tanpa nyala apapun.[[102]](#footnote-102)

Hanya saja sepanjang itu kita nyaris tidak pernah menelisik lebih jauh dan mencoba kritis, dengan bertanya benarkah pengetahuan dapat membuat manusia menjadi baik? Benarkah pengetahuan dapat membentuk manusia menjadi spesies yang bermoral? Jika memang pengetahuan mampu melakukan keajaiban itu, apa sebenarnya yang dimiliki oleh pengetahuan hingga ia dapat mengubah manusia yang jahat *-syarr-* menjadi manusia baru yang baik.

Epistemologi disebut juga sebagai teori pengetahuan, yakni cabang filsafat yang membicarakan tentang cara memperoleh pengetahuan, hakikat pengetahuan dan sumber pengetahuan. Menyimak dari pernyataan tersebut maka dalam pendidikan Islam harus mengetahui pendekatan dan metode yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan. Ada beberapa pendekatan yang digunakan untuk membangun pengetahuan tentang pendidikan Islam diantaranya sebagai berikut:

1. Pendekatan pengalaman yaitu pemberian pengalaman kegamaan kepada peserta didik dalam rangka penanaman nilai-nilai keagamaan.Syaiful Bahri Djamrah menyatakan bahwa pengalaman yang dilalui seseorang adalah guru yang terbaik.[[103]](#footnote-103)
2. Pendekatan pembiasaan yaitu suatu tingkah laku tertentu yang sifatnya otomatis tanpa direncanakan terlebih dahulu dan berlaku begitu saja yang ada kala tanpa dipikirkan.[[104]](#footnote-104)
3. Pendekatan emosional ialah usaha untuk menggugah perasaan dan emosi peserta didik dalam meyakini ajaran Islam serta dapat merasakan mana yang baik dan mana yang buruk.
4. Pendekatan rasional adalah suatu pendekatan menggunakan rasio (akal) dalam memahami dan menerima kebesaran dan kekuasaan Allah.
5. Pendekatan fungsional adalah usaha memberikan materi agama dengan menekankan kepada segi kemanfaatn pada peserta didik dalam kehidupan sehari-hari, sesuai dengan tingkat perkembangannya.
6. Pendekatan ketauladanan adalah memperlihatkan ketauladanan,baik yang berlangsung melalui penciptaan kondisi pergaulan yang akrab ntara personal sekolah, perilaku pendidikan dan perilaku pendidik yang mencerminkan akhlak terpuji, maupun yang tidak langsung melalui suguhan ilustrasi berupa kisah-kisah ketauladanan.[[105]](#footnote-105)

Dengan demikian kita juga harus mengetahui metode yang dapat digunakan untuk membangun pengetahuan tentang pendidikan Islam diantaranya sebagai berikut:

1. Metode Rasional (*Manhaj ‘Aqli*)

Metode Rasional (منهج العقل) adalah metode yang dipakai untuk memperoleh pengetahuan dengan menggunakan pertimbangan-pertimbangan atau kriteria-kriteria kebenaran yang bisa diterima rasio. Menurut metode ini sesuatu dianggap benar apabila bisa diterima oleh akal, seperti sepuluh lebih banyak dari lima. Tidak ada orang yang mampu menolak kebenaran ini berdasarkan penggunaan akal sehatnya, karena secara rasional sepuluh lebih banyak dari lima.[[106]](#footnote-106)

1. Metode Intuitif (*Manhaj Dzawqi*)

Metode intuitif (منهج الذوق)merupakan metode yang khas bagi ilmuan yang menjadikan tradisi ilmiah Barat sebagai landasan berpikir mengingat metode tersebut tidak pernah diperlukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Sebaliknya dikalangan Muslim seakan-akan ada kesepakatan untuk menyetujui intuisi sebagai satu metode yang sah dalam mengembangkan pengetahuan, sehingga mereka telah terbiasa menggunakan metode ini dalam menangkap pengembangan pengetahuan. Muhammad Iqbal menyebut intuisi ini dengan peristilahan “cinta” atau kadang-kadang disebut pengalaman kalbu.

1. Metode Dialogis (*Manhaj Jidali*)

Metode dialogis (منهج الجدال) yang dimaksudkan di sini adalah upaya menggali pengetahaun pendidikan Islam yang dilakukan melalui karya tulis yang disajikan dalam bentuk percakapan antara dua orang ahli atau lebih berdasarkan argumentasi-argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

1. Metode Komparatif (*Manhaj Muqaran*)

Metode komparatif (منهج المقارن) adalah metode memperoleh pengetahuan (dalam hal ini pengetahuan pendidikan Islam, baik sesama pendidikan Islam maupun pendidikan Islam dengan pendidikan lainnya). Metode ini ditempuh untuk mencari keunggulan-keunggulan maupun memadukan pengertian atau pemahaman, supaya didapatkan ketegasan maksud dari permasalahan pendidikan.

1. Metode Kritik (*Manhaj Naqdi*)

Metode kritik (منهج النقد) yaitu sebagai usaha untuk menggali pengetahuan tentang pendidikan Islam degnan cara mengoreksi kelemahan-kelemahan suatu konsep atau aplikasi pendidikan, kemudian menawarkan solusi sebagai altrnatif pemecahannya.[[107]](#footnote-107) 

Manusia yang pada mulanya hidup dengan pola apa adanya, karena pengetahuan, kemudian memulai hidupnya dengan cara serta kesadaran-kesadaran baru. Meskipun di era-era awal peran pengetahuan berkisar pada aspek-aspek yang begitu pragmatis, terkait dengan berbagai pengubahan sisi pragsis keberkangsungan hidup semata, lahirnya pengetahuan telah menjadi era baru yang sepenuhnya berbeda dari sebelumnya.

Dalam  *fashion*misalnya, manusia pada mulanya hidup seperti binatang tanpa pakaian apapun, di era ini mulai mengalami gejala *fashion*, tertarik menggunakan pakaian-pakaian ala kadarnya. Dalam pemikiran manusia yang baru inilah munculah pengetahuan-pengatahun baru, yang dapat bermanfaat bagi perkembangan manusia menjadi lebih baik.

Firman Allah Ta’ala:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لأولِي الألْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

*Artinya:”Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah di kala berdiri, duduk atau dalam keadan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. (Âli-‘Imrân[3]:190-191).[[108]](#footnote-108)*

Dalam ayat lain Allah Ta’ala berfirman:

قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَمَا تُغْنِي الآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ

*Artinya:”Katakanlah: "Perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan rasul-rasul yang memberi peringatan, bagi orang-orang yang tidak beriman".(Yûnus[10]:101).[[109]](#footnote-109)*

قل  (*qul*) berasal dari akar kata (قال يقول قولا قل), kata *qul* adalah kata perintah (*fi’il amar)* yang secara harfiyah berarti “katakanlah”. Kata *qul* secara tekstual diperintahkan kepada Nabi Muhammad Saw, tetapi dalam konteks atau khithab ‘am-nya ditujukan kepada seluruh manusia, dalam istilah bahasa arab disebut “*mukhathab ghair mu’ayan”.*

أنظروا (*undzuru*) bentuk jama’ dari *undzur*(أنظر) yang secara  *harifah* bermakna lihat, perhatikan, renungkan. Kata *unzur*termasuk kata perintah (*fi’il amar*) yang besal dari akar kata (نظرينظرأنظر). Adapun kata *as-samawat* (السموات) bentuk jama’ dari *as-samaa* (السماء) yang dalam kamus bahasa arab diartikan; langit, awan, hujan. الارض (*ardhu*) dipahami sebagai bumi, sesuatu yang berada di bawah.

Dengan memperhatikan kosa kata di atas, dapat dipahami bahwa kita dianjurkan untuk membaca, merenungkan seluruh ayat Allah yang tercipta. Yakni memperhatikan atau meneliti apa yang ada di atas, dan apa yang di bumi dan perut bumi.

Ayat ini menyadarkan kita pada firman Allah yang termaktub pada surat al-Baqarah ayat 31;

وعلّم آدم الأسماء كلها

*Artinya:”Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya”.*

Jika diperhatikan ayat di atas, terutama pada kata ‘*allama* menggunakan *syiddah* atau menggunakan *fi’il mudho’af* atau *mazid biharfin wahid.*Dalam bahasa arab jika menggunakan syiddah mengandung isyarat adanya kerja keras atau kerjaan dua kali atau berulang. Dengan demikian dapat dipahami bahwa Allah memberikan ilmu kepada Nabi Adam lewat sebuah proses, atau Allah memberikan masalah kepada Nabi Adam dan ia diberikan kemampuan oleh Allah dapat mengatasinya. Proses mengatasi masalah disebut ilmu.

Dalam kajian filsafat ada yang disebut dengan pengetahuan dan ada juga yang disebut ilmu. Perbedaannya ilmu diperoleh melalui proses atau pengetahuan yang tersusun secara rasional dan sistematis. Adapun pengetahuan didapat secara praktis, atau ilmu merupakan kumpulan dari pengerahuan. Sesuai dengan namanya ilmu, yang sebelum menjadi kata ilmu harus mengalami proses *alima, ya’lamu, ilman* (علم يعلم علما).

Ayat tersebut di atas -surat Yunus ayat 101-, tentang anjuran kepada manusia untuk memperhatikan alam sekitar (langit dan bumi). Dengan memperhatikan alam sekitar melahirkan berbagai disiplin ilmu. Dengan memperhatikan bintang melahirkan ilmu astronomi, memperhatikan angin melahirkan ilmu komunikasi, memperhatikan bumi melahirkan ilmu bumi (geografi), memperhatikan makhluk hidup melahirkan ilmu biologi, ilmu kedokteran, psikologi, psikoterapi dan disiplin ilmu-ilmu lainnya.

Dari ayat tersebut terdapat dua pelajaran penting yaitu:‎

* 1. Menelaah dan merenungi ciptaan Allah di alam raya ini merupakan cara yang paling wajar dan sederhana untuk bisa mengenal Allah, Sang Pencipta.

1. Dengan menyaksikan ayat-ayat suci Allah, mendengar seruan kebenaran tidaklah cukup, namun kehendak dan hasrat manusia untuk menerima kebenaran itu yang perlu.
   * + 1. **Aksiologi Pendidikan Islam**

Aksiologi adalah istilah yang berasal dari bahasa Yunani yaitu; *axios* yang berarti sesuai atau wajar dan *logos* yang berarti ilmu. Aksiologi dipahami sebagai teori nilai.

Kemudian Muzayyin Arifin memberikan definisi aksiologi sebagai suatu pemikiran tentang masalah nilai- nilai termasuk nilai tinggi dari Tuhan, misalnya nilai moral, nilai agama dan nilai keindahan (estetika).[[110]](#footnote-110)

Menurut Notonegoro, nilai dibedakan menjadi tiga macam, yaitu nilai material, nilai vital dan nilai kerohanian

1. Nilai material adalah segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan jasmani manusia atau kebutuhan ragawi manusia.
2. Nilai vital adalah segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktivitas.
3. Nilai kerohanian adalah segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Nilai kerohanian meliputi:
4. Nilai kebenaran yang bersumber pada akal (rasio, budi dan cipta) manusia;
5. Nilai keindahan atau nilai estetis yang bersumber pada unsur perasaan manusia;
6. Nilai kebaikan atau nilai moral yang bersumber pada unsur kehendak (karsa) manusia;
7. Nilai religius (agama) yang merupakan nilai kerohanian tertinggi dan mutlak yang bersumber pada kepercayaan atau keyakinan manusia.

Di dalam ajaran Islam merupakan perangkat sistem nilai yaitu pedoman hidup secara Islami, sesuai dengan tuntunan Allah Ta’ala.  Aksiologi pendidikan Islam berkaitan dengan nilai-nilai, tujuan dan target yang akan dicapai dalam pendidikan Islam.

Tujuan utama pendidikan Islam adalah untuk mendapatkan ridha Allah Ta’ala. Dengan pendidikan Islam, diharapkan lahir individu-individu yang baik, bermoral, berkualitas, sehingga bermanfaat bagi diri sendiri, keluaga, masyarakat, negara dan umat manusia secara keseluruhan, meraih kebahagiaan dunia dan akhirat.

Beberapa indikator dari tercapainya tujuan pendidikan Islam dapat dibagi menjadi tiga tujuan mendasar, yaitu:

1. Tercapainya anak didik yang cerdas. Ciri-cirinya adalah memiliki tingkat kecerdasan intelektualitas yang tinggi sehingga mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh dirinya sendiri maupun membantu menyelesaikan masalah orang lain yang membutuhkannya.
2. Tercapainya anak didik yang memiliki kesabaran dan kesalehan emosional, sehingga tercermin dalam kedewasaan menghadapi

masalah di kehidupannya.

1. Tercapainya anak didik yang memiliki kesalehan spiritual, yaitu menjalankan perintah Allah dan Rasulullah Saw.

Dalam pengertian ini jika kita menganggap sesuatu hal sebagai sesuatu yang demikian, serta merta kita mesti juga telah memahami dengan baik apa, mengapa dan bagaimananya suatu hal tersebut dapat kita anggap sebagai sesuatu yang begitu penting. Hal ini tidak hanya berlaku pada satu hal, tetapi berlaku pada apapun, termasuk salah satunya pada pendidikan. [[111]](#footnote-111)

Firman Allah Ta’ala:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإنْسَ إِلا لِيَعْبُدُونِ

*Artinya:”Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku.”(adz-Dzâriyât [51]:56).[[112]](#footnote-112)*

Didahulukannya penyebutan kata (الجن) jin dari kata (الإنس) manusia karena jin memang lebih dahulu diciptakan Allah dari pada manusia. Huruf (ل) pada kata (ليعبدون) bukan berarti agar supaya mereka beribadah atau agar Allah disembah, sedangankan menrut Quraish Shihab dalam tasirnya, al-Misbah, penafsiaran ayat di atas adalah sebagai berikut: “Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia untuk satu manfaat yang kembali pada diri-Ku. Aku tidak menciptakan mereka melainkan agar tujuan atau kesudahan aktivitas meraka adalah beribadah kepada-Ku.

Ayat di atas menggunakan bentuk persona pertama (Aku), karena memang penekanannya adalah beribadah kepada-Nya semata-mata, maka redaksi yang digunakan berbentuk tunggal dan tertuju kepada-Nya semata-mata tanpa memberi kesan adanya keterlibatan selain Allah Swt,

1. **Pembahasan Hasil Penelitian yang Relevan**

Dalam penelitian disertasi yang dilakukan Nirmalawati Program Studi Manajemen Pendidikan, Program Pascasarjana, Universitas Negeri Malang tahun 2009 dengan judul: Hubungan antara Kapabilitas Kepemimpinan, Kompetensi Dosen, Komitmen Dosen, dan Akuntabilitas Lembaga dengan Kinerja Lembaga dalam Pelaksanaan Penjaminan Mutu pada Universitas Negeri di Jawa Timur menunjukkan hasil bahwa (1) gambaran kapabilitas kepemimpinan, kompetensi dosen, komitmen dosen, dan akuntabilitas lembaga, dan kinerja lembaga dalam pelaksanaan penjaminan mutu pada universitas negeri di Jawa Timur yang dipersepsi oleh responden memiliki kategori rata-rata baik, (2) makin tinggi kapabilitas kepemimpinan tidak diikuti makin tingginya kinerja lembaga dalam pelaksanaan penjaminan mutu di universitas negeri Jawa Timur, (3) makin kuat akuntabilitas lembaga diikuti makin tingginya kinerja lembaga dalam pelaksanaan penjaminan mutu, (4) makin kuat komitmen dosen diikuti makin tingginya kinerja  lembaga dalam pelaksanaan penjaminan mutu di universitas negeri Jawa Timur, (5) makin tinggi kompetensi dosen tidak diikuti makin tingginya kinerja lembaga dalam pelaksanaan penjaminan mutu di universitas negeri Jawa Timur, (6) makin kuat kapabilitas kepemimpinan diikuti makin tingginya akuntabilitas lembaga, (7) makin kuat komitmen dosen diikuti makin tingginya akuntabilitas lembaga, (8) makin tinggi kompetensi dosen tidak diikuti makin tingginya akuntabilitas lembaga, (9) makin tinggi kapabilitas kepemimpinan diikuti makin tingginya kinerja lembaga dalam pelaksanaan penjaminan mutu, asalkan disertai akuntabilitas lembaga yang tinggi, (10) makin tinggi kapabilitas kepemimpinan tidak diikuti makin tingginya kinerja lembaga dalam pelaksanaan penjaminan mutu, walaupun disertai kompetensi dosen yang tinggi, (11) makin tinggi kapabilitas kepemimpinan diikuti makin tingginya kinerja lembaga dalam pelaksanaan penjaminan mutu, asalkan disertai komitmen dosen yang tinggi, (12) makin tinggi komitmen dosen diikuti makin tingginya kinerja lembaga dalam pelaksanaan penjaminan mutu, asalkan disertai akuntabilitas lembaga yang tinggi, (13) makin tinggi kompetensi dosen tidak diikuti makin tingginya kinerja lembaga dalam pelaksanaan penjaminan mutu, walaupun disertai akuntabilitas lembaga yang tinggi, (14) makin tinggi kapabilitas kepemimpinan diikuti makin tingginya kinerja lembaga dalam pelaksanaan penjaminan mutu, asalkan disertai komitmen dosen dan akuntabilitas lembaga yang tinggi, (15) makin tinggi kapabilitas kepemimpinan tidak diikuti makin tingginya kinerja lembaga dalam pelaksanaan penjaminan mutu, walaupun disertai kompetensi dosen dan akuntabilitas lembaga yang tinggi, (16) makin tinggi kapabilitas kepemimpinan diikuti makin tingginya kinerja lembaga dalam pelaksanaan penjaminan mutu, asalkan disertai kompetensi dosen, komitmen dosen dan akuntabilitas lembaga yang tinggi.

Berdasarkan temuan penelitian ini, maka disarankan para pembuat kebijakan, terutama lembaga sertifikasi penjaminan mutu, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Tim audit,  para pimpinan perguruan tinggi negeri untuk dapat mengambil manfaat hasil penelitian ini sebagai bahan acuan dalam mengawasi dan meningkatkan kinerja lembaga perguruan tinggi. Bagi para dosen universitas negeri diharapkan dapat memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai acuan dalam meningkatkan komitmen terhadap lembaga guna meningkatkan mutu di universitasnya. Disamping itu diperlukan peningkatan kompetensi, dimana kompetensi yang dimaksud adalah kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, dan kompetensi professional. Untuk para peminat penelitian dalam bidang pendidikan dapat melanjutkan penelitian ini dengan mengkaji lebih lanjut faktor-faktor lain yang mempengaruhi kinerja lembaga perguruan tinggi dalam pelaksanaan penjaminan mutu.

Penelitian yang dilakukan S. Agus Santoso, Universitas Brawijaya Malang 2010 dengan judul Akuntabilitas Administrasi dalam Penyelenggaraan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka (UPBJJ-UT) di Kabupaten Sampang Madura, Kajian Perspektif *Good Governance* menunjukkan hasil bahwa *Pertama,* pelaksanaan akuntabilitas administrasi menuju good governance dalam penyelenggaraan pendidikan guru sekolah dasar unit program belajar jarak jauh universitas terbuka di kabupaten Sampang Madura belum berjalan optimal, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu, sistem penyelenggaraannya masih bersifat sentralistik, daerah sebagai penyelenggara pendidikan guru sekolah dasar unit program belajar jarak jauh universitas terbuka tidak mempunyai kewenangan penuh. Selanjutnya UPBJJ-UT Surabaya hanya kepanjangan tangan dari UT pusat, dalam hal ini UPBJJ-UT Surabaya dalam menangani seperti kasus-kasus nilai, UPBJJ-UT Surabaya tidak mempunyai kewenangan dalam hal itu.

*Kedua,* pengurus pengelolaan yang ditetapkan dinas pendidikan kabupaten sampang, hanya sifatnya sebagai penyelenggara pendidikan guru sekolah dasar unit program belajar jarak jauh universitas terbuka, sehingga dalam hal ini kewenangan pengelolaan yang ada di daerah kabupaten Sampang Madura juga belum berjalan optimal.

*Ketiga,* menyangkut penyediaan tutor dalam hal ini dinas pendidikan kabupaten Sampang tidak mempunyai kewenangan terhadap penyediaan tutor, karena hal ini yang menentukan UPBJJ-UT Surabaya. Sehingga di lapangan masih ditemukan tutor yang kehadirannya dirasa kurang oleh mahasiswa dalam kegiatan tutorial.

*Keempat,* menyangkut sarana prasarana dalam kegiatan tutorial bisa dikatakan cukup baik walaupun ada beberapa keluhan-keluhan oleh mahasiswa, namun dari pihak pengelola dinas pendidikan kabupaten Sampang selalu akan berupaya terus dalam meningkatkan sarana prasarana.

1. Jhon M. Echols & Hassan Shadily, *An English-Indonesian Dictionary,* (PT. Gramedia, Jakarta:Cet. XXIV, 2000), h. 6 [↑](#footnote-ref-1)
2. Jhon M. Echols & Hassan Shadily, *Ibid*., h. 7 [↑](#footnote-ref-2)
3. K.H. Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir, Arab-Indonesia,* (Surabaya, Pustaka Progressif: 2015), h. 601 [↑](#footnote-ref-3)
4. Mark Bovens, *Two Concepts of Accountability, Utrecht School of Governance,* (Utrecht University: Dubnick, 2003), p. 32 [↑](#footnote-ref-4)
5. *Ibid*., p 34 [↑](#footnote-ref-5)
6. Elfalasy, A. “*Akuntabilitas Pendidikan”. (http://elfalasy88.wordpress.com /2010/12/01/akuntabilitas-pendidikan,* diakses pada tanggal10 Oktober 2017. [↑](#footnote-ref-6)
7. Nanang Fattah, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan,* (Bandung: CV. Rosdakarya, 2001), h. 53 [↑](#footnote-ref-7)
8. Sirajudin H. Saleh & Aslam Iqbal, “*Accountability”, dalam* *Accountability The Endless Prophecy*, (Asian and Pacific Develompent Centre, 1995), h. 102 [↑](#footnote-ref-8)
9. Anonymous, *Modul Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,*  edisi ke 2, (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 2004), h. 36-37 [↑](#footnote-ref-9)
10. Al-Ma’luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A’lam,* (Bairut: Dar al- Masyriq, 1986), Cet. 28, h. 316 [↑](#footnote-ref-10)
11. K.H. Ahmad Warson Munawwir, *Loc. cit.* [↑](#footnote-ref-11)
12. Al-Ma’luf, *Op. cit*., h. 286 [↑](#footnote-ref-12)
13. Al-Ma’luf, *Ibid*., h. [↑](#footnote-ref-13)
14. Q.S. al-Isra’ (17): 34 [↑](#footnote-ref-14)
15. Q.S. al-Isra’ (17): 34 [↑](#footnote-ref-15)
16. Q.S. al-Furqan (25): 16 [↑](#footnote-ref-16)
17. Q.S. al-Ahzab (33): 15 [↑](#footnote-ref-17)
18. Q.S. ash-Shaafat (37): 24 [↑](#footnote-ref-18)
19. Q.S. al-Hijr (15): 92-93 [↑](#footnote-ref-19)
20. Q.S. al A’raf (7): 6 [↑](#footnote-ref-20)
21. Q.S. an-Nahl (16):56 dan 93. [↑](#footnote-ref-21)
22. Q.S. an-Nahl (16):93

    [↑](#footnote-ref-22)
23. Q.S. at-Takatsur (102): 8 [↑](#footnote-ref-23)
24. Q.S. al-Baqarah (2); 134, 141 [↑](#footnote-ref-24)
25. Q.S. al-Anbiya (21);13, [↑](#footnote-ref-25)
26. Q.S Saba’ (34): 25 [↑](#footnote-ref-26)
27. Q.S. az-Zukhruf (43): 44 [↑](#footnote-ref-27)
28. Q.S. al-Anbiya (21): 23 [↑](#footnote-ref-28)
29. Q.S. al-Qashash (28): 78 [↑](#footnote-ref-29)
30. Q.S ar-Rahman (55): 39 [↑](#footnote-ref-30)
31. *Ibid.*, h. 323 [↑](#footnote-ref-31)
32. Muhammad Fuad Abdulbaqi, *al Mu’jam al Mufahras li Alfadz al-Qur’an al Karim,* (Bairut, Libanon: Daar al-Ma’rifah, 1414 h/1994 M), h. 428-429 [↑](#footnote-ref-32)
33. Q.S al-Hadid (57): 27 [↑](#footnote-ref-33)
34. Q.S. al-Mukminun [23]: 8) dan al-Ma’arij (70): 32 [↑](#footnote-ref-34)
35. Q.S. Yusuf (12): 72. [↑](#footnote-ref-35)
36. Q.S. al-Qalam (68): 40 [↑](#footnote-ref-36)
37. Q.S. an-Nisa’ (4): 58

    [↑](#footnote-ref-37)
38. Q.S. al-Anfal (8): 27 [↑](#footnote-ref-38)
39. Q.S. al-A’raf (7): 18 [↑](#footnote-ref-39)
40. Q.S. Yusuf (12): 54 [↑](#footnote-ref-40)
41. Q.S. asy-Syu’ara (26): 107, 125, 143, 162, 178 [↑](#footnote-ref-41)
42. Q.S. an-Naml (27): 39 [↑](#footnote-ref-42)
43. Q.S. al-Qashsash (28): 26 [↑](#footnote-ref-43)
44. Q.S. al-Hijr (15): 9

    [↑](#footnote-ref-44)
45. Abi Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *Riyadh ash-Shalihin, di Tashhih oleh Muhammad bin ‘Alan ash-Shiddiqi,* w. 1057 H*,* (Cairo: Maktabah Jami’ah al-Azhar Mesir, tt). h. 152 [↑](#footnote-ref-45)
46. Mark Turner and David Hulme, *Governance, Administration and Development: Making The Work:* (Lodon: Mac Millan Press. Ltd, 2007), p. 12 [↑](#footnote-ref-46)
47. Elfalasy, *Op.cit.* [↑](#footnote-ref-47)
48. Fasli Jalal dan Dedi Supriadi, *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah,* (Yogyakarta: Adicipta. 2001), h. 88 [↑](#footnote-ref-48)
49. H.A.R. Tilaar, *Membenahi Pendidikan Nasional,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h. 25. [↑](#footnote-ref-49)
50. Fasli Jalal, *Op.cit*. h. 98 [↑](#footnote-ref-50)
51. *Ibid*, h. 88 [↑](#footnote-ref-51)
52. PH. Slamet, *Kapita Selekta Desentralisasi Pendidikan di Indonesia,* (Jakarta: Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama, Depdiknas RI. 2005). h. 75 [↑](#footnote-ref-52)
53. Rita Headington, *Monitoring, Assesment, Recording, Reporting and Accountability: Meeting the Standards*, London: David Fulton Publishers, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 124 [↑](#footnote-ref-53)
54. *Ibid*, h. 133

    [↑](#footnote-ref-54)
55. P.H. Slamet, *Op. cit*., h. 5

    [↑](#footnote-ref-55)
56. Zamroni,  *School Based Management*, (Yogyakarta: Pascarsarjana Universitas Negeri Yogyakarta: 2008), h. 12 [↑](#footnote-ref-56)
57. Rita, *Op. cit*., h. 83 [↑](#footnote-ref-57)
58. Rita, *Ibid.* [↑](#footnote-ref-58)
59. Rita, *Ibid.,* h*.* 84 [↑](#footnote-ref-59)
60. Mohrman, Susan Albert and Wohlstette, Priccilla, *School-Based Management, Organizing for High Performance*, (San Fransisco: Jossey-Bass Publisher. 1994). h. 47 [↑](#footnote-ref-60)
61. H.A.R. Tilaar, *Op. cit.,* h. 25. [↑](#footnote-ref-61)
62. Beni Ahmad Saebani., Hendra Akhdiyat, *Ilmu Pendidikan Islam,* Cet. I (Bandung: Pustaka Setia.2009), h. 21-22. [↑](#footnote-ref-62)
63. Beni Ahmad Saebani., Hendra Akhdiyat, *Ibid.,* h. 40 [↑](#footnote-ref-63)
64. Syaikh Abdur-Rahmân bin Nashir as-Sa’diy,*Taisîr al-Karîm ar-Rahmân fî Tafsîr al-Kalâm al-Mannân Tafsir Surat al-Fâtihah*. Lihat pula yang senada dengan itu di Majalah As-Sunnah, edisi 12/Tahun XI/1429H/2008M, rubrik ‘Aqidah, h. 37 [↑](#footnote-ref-64)
65. Syaikh Ali bin Hasan al-Halabi, *At-Tashfiyah wa at-Tarbiyah wa Atsaruhuma fî Isti’naafi al-Hayâti al-Islamiyati*, h. 95-99 [↑](#footnote-ref-65)
66. Amin Muhammad ‘Abdul-Wahab dan Muhammad ash-Shâdiq al-‘Abyadiy,  *Lisân al-‘Arab,* Mâddah Rabâ, Tashîh:, V/126.  
     [↑](#footnote-ref-66)
67. *Ibid*. h. 128 [↑](#footnote-ref-67)
68. Tahqîq: Khalîl Ma’mûn Syiha, *Shahîh Muslim Syarh Nawawi,* , *Kitab al-Adab wa al-Birri wa-ash-Shilah,* Bab: Fadhlu al-Hubbi Fillâh, No. 6495 – XVI/340.  
     [↑](#footnote-ref-68)
69. Amin Muhammad ‘Abdul-Wahab dan Muhammad ash-Shâdiq al-‘Abyadiy, *Op. cit.* h. 96 [↑](#footnote-ref-69)
70. H. Ramyulis. *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta, Kalam Mulia, Cet., Ke-7, 2008), h. 14. Cet. Ke-7 [↑](#footnote-ref-70)
71. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-71)
72. Musthafa Al-Maraghi. *Tafsir Al-Maraghi*, (Bairut: Dar Fikr, tt, juz ke-1), h. 30.

    [↑](#footnote-ref-72)
73. المناوي، محمد عبد الرؤوف (ت 1031هـ/1612م)، التوقيف على مهمات التعاريف، تحقيق محمد رضوان الداية، بيروت، دار الفكر المعاصر، 1410 هـ / 1990م، باب التاء، فصل الراء، 169. [↑](#footnote-ref-73)
74. Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu, *Nidâ` Ila al-Murabbîn wa al-Murabbiyât,* *sub judul Muhimmah al-Murabbi an-Nâjih.,* tt. dari Silsilah at-Taujîhiyyât, no. 17. h. 9 [↑](#footnote-ref-74)
75. Lihat Q.S adz-Dzariyaat: 56 [↑](#footnote-ref-75)
76. Lihat Q.S al-Qashash :77

    [↑](#footnote-ref-76)
77. Ibnu al-Qayyim, Taqdîm: Syaikh Ali bin Hasan al-Halabi, Muraja’ah: Syaikh Bakr Abu Zaid,  *Miftâh Dâr as-Sa’âdah wa Mansyûr wa Ayati Ahli al-‘Ilmi wa al-Irâdah,* h. I/262. [↑](#footnote-ref-77)
78. Hadits shahîh. Lihat *Shahîh Sunan Abi Dawud* (II/407), Kitab al-‘Ilmi, no. 3641, Shahîh Sunan at-Tirmidzi (III/71), *Kitab al-‘Ilmi,* no. 2682, dan *Shahîh Sunan Ibni Majah* (I/92), Muqadimah, no. 183. [↑](#footnote-ref-78)
79. Omar Mohammad al-Toumy al Syaibany, *Filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), h. 446. [↑](#footnote-ref-79)
80. *Ibid,* h.459. [↑](#footnote-ref-80)
81. Q.S.al-A’raf (7): 61 [↑](#footnote-ref-81)
82. Samsul Nizar, *Sejarah Pendidikan Islam,* (Jakarata: Kencana Prenada Media,

    2007), h. 90 [↑](#footnote-ref-82)
83. Jalaluddin, *Teologi Pendidikan,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 125  
     [↑](#footnote-ref-83)
84. Q.S. al-Ahzab (33): 21 [↑](#footnote-ref-84)
85. Jalaluddin, *Op. cit.*, h. 133  
     [↑](#footnote-ref-85)
86. Q.S. al-Baqarah (2): 31 [↑](#footnote-ref-86)
87. Q.S. al-Baqarah (2): 32*.* [↑](#footnote-ref-87)
88. محجوب، عباس، أصول الفكر التربوي في الإسلام، دمشق، دار ابن كثير، 1398هـ/ 1978م، 152ص [↑](#footnote-ref-88)
89. أحمد، محمد حسين، ***الأهداف التربوية للعبادات في الإسلام***، رسالة لنيل درجة الدكتوراه في التربية، كلية التربية، جامعة طنطا، قسم أول التربية، غير منشورة،14

    [↑](#footnote-ref-89)
90. Zahara Idris, *Dasar-Dasar Kependidikan* (Padang: Angkasa Raya, 1981), h. 10.

    [↑](#footnote-ref-90)
91. Omaar Mohammad Al-Toumy Al Syaibani, *Op. cit*, h. 567. [↑](#footnote-ref-91)
92. Q.S. al-Fushshilat : 53 [↑](#footnote-ref-92)
93. H.R. Muslim, Hadits. No. 325 [↑](#footnote-ref-93)
94. Mohammad Adib, *Filsafat Ilmu: Ontologi, Epistemologi, Aksiologi, dan Logika Ilmu Pengetahuan.*(Yogyakarta: Pustaka Pelajar: 2011), h. 69. [↑](#footnote-ref-94)
95. Hamdani Ihsan dan Fuad Ihsan, *Filsafat Pendidikan Islam,*(Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 33. [↑](#footnote-ref-95)
96. Hasan Basri, *Filsafat Pendidikan Islam,*(Bandung: Pustaka Setia, 2009), h.18. [↑](#footnote-ref-96)
97. Jalaluddin, *Filsafat Pendidikan Islam,*(Jakarta: Kalam Mulia, 2012), h. 124 [↑](#footnote-ref-97)
98. Jalaluddin,  *Ibid,* h.126 [↑](#footnote-ref-98)
99. Abuddin Nata, *Manajemen Pendidikan Islam,* (Jakata: Kencana, 2008), h. 43. [↑](#footnote-ref-99)
100. Q.S. Ali Imran (3): 164 [↑](#footnote-ref-100)
101. Mohammad Adib, *Op. cit.,* h. 74-75 [↑](#footnote-ref-101)
102. Teguh Wangsa Gandhi H.W, *Filsafat Pendidikan,*(Jogjakarta: Ar- Ruzz Media, 2011), h. 92. [↑](#footnote-ref-102)
103. Syaiful Bahri Djmarah dan Azwan Zain, *Strategi Belajar Mengajar,* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997), h.70. [↑](#footnote-ref-103)
104. Ramayulis, *Metodelogi Pengajaran Agama Islam,*(Jakarta: Kalam Mulia, 2001), h. 282. [↑](#footnote-ref-104)
105. Ramayulis dan Syamsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam,*(Jakarta: Kalam Mulia, 2009), h. 210. [↑](#footnote-ref-105)
106. Mujamil Qomar, *Epistimologi Pendidikan Islam,* (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 269. [↑](#footnote-ref-106)
107. Mujamil Qomar, *Ibid*., h. 270. [↑](#footnote-ref-107)
108. Q.S. Ali Imran (3): 190-191

     [↑](#footnote-ref-108)
109. Q.s. Yunus (10): 101

     [↑](#footnote-ref-109)
110. Muzayyin Arifin. *Filsafat Pendidikan Islam,*(Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 8 [↑](#footnote-ref-110)
111. Teguh Wangsa Gandhi HW, *Op. cit.,* h. 106 [↑](#footnote-ref-111)
112. Q.S. adz-Dzâriyât (51):56 [↑](#footnote-ref-112)